

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
2020

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	I
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	V
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Cimahi 2017-2022.....	8
2.1.1 Bagian Pemerintahan	8
2.1.2 Bagian Hukum	12
2.1.3 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	14
2.1.4 Bagian Administrasi Perekonomian	16
2.1.5 Bagian Administrasi Pembangunan	18
2.1.6 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	18
2.1.7 Bagian Organisasi	19
2.1.8 Bagian Umum dan Protokol	21
2.1.9 Bagian Tata Usaha	22
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	43
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Cimahi	44

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	46
3.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi	46
3.2 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020	48
3.2.1 Bagian Pemerintahan	48
3.2.1.1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	48
3.2.1.2 Program Pengelolaan Perbatasan	52
3.2.1.3 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	52
3.2.2 Bagian Hukum	53
3.2.2.1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	53
3.2.3 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	57
3.2.3.1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	57
3.2.4 Bagian Administrasi Perekonomian	60
3.2.4.1 Program PemePerekonomian dan Pembangunan	60
3.2.5 Bagian Administrasi Pembangunan	62
3.2.5.1 Program Perekonomian dan Pembangunan	63
3.2.6 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
3.2.6.1 Program Perekonomian dan Pembangunan	63
3.2.7 Bagian Organisasi	65
3.2.7.1 Program Administrasi Umum	65
3.2.8 Bagian Umum dan Protokol	69
3.2.8.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69

3.2.9 Bagian Tata Usaha	76
3.2.9.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah	
Daerah Kabupaten/Kota	76
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH	
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021	81
BAB IV PENUTUP.....	96

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1.	Konsistensi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	3
Gambar 2.2.	Hubungan Kinerja Antara Perencanaan Tingkat Kota Dan Tingkat Sekretariat Daerah Dalam Mencapai Visi Dan Misi Kota	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kota Cimahi Bagian Pemerintahan	25
Tabel. 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kota Cimahi Bagian Hukum	28
Tabel. 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kota Cimahi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	30
Tabel. 2.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kota Cimahi Bagian Administrasi Perekonomian	32
Tabel. 2.5. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kota Cimahi Bagian Administrasi Pembangunan	34
Tabel. 2.6. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kota Cimahi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	35
Tabel. 2.7. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kota Cimahi Bagian Organisasi	36
Tabel. 2.8. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kota Cimahi Bagian Umum dan Protokol	37

Tabel. 2.9.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kota Cimahi Bagian Tata Usaha	41
Tabel 3.1.	Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022	46
Tabel 3.2.	Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2021	47
Tabel 4.1.	Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Tahun 2021	82
Tabel 4.2.	Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun 2021	84
Tabel 4.3.	Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021	86
Tabel 4.4.	Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2021	88
Tabel 4.5.	Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2021	89
Tabel 4.6.	Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021	90
Tabel 4.7.	Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun 2021	91
Tabel 4.8.	Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Protokol Tahun 2021	92
Tabel 4.9.	Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Tahun 2021	95

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana kerja setiap 1(satu) tahun. Penyusunan rencana kerja Tahun Anggaran 2021 ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini disajikan dengan keadaan yang sebenarnya dari masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cimahi dengan mendasarkan pada analisis yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini, dan kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Harapan kami, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cimahi dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Cimahi, Agustus 2020

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, diuraikan latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, terutama dalam hubungannya dengan berbagai perencanaan lainnya yang bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan Kota Cimahi. Beserta itu pula, dicantumkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan dokumen perencanaan ini, maksud serta tujuan penulisan dokumen, juga sistematika penulisan yang menguraikan keterkaitan antar bab dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 ini.

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 11, Rencana Kerja Satuan Kerja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Namun, untuk memahami fungsi Renja perangkat daerah ini lebih jauh, maka perlu dipaparkan terlebih dahulu mengenai keterkaitan antara Renja perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

Secara umum, perencanaan pembangunan daerah dilakukan untuk mencapai suatu visi atau cita-cita, dari kondisi awal yang ada di daerah tersebut (sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 1). Cita-cita atau visi daerah ditentukan oleh kepala daerah, dan selanjutnya berbagai perencanaan disusun untuk mencapai visi tersebut. Rencana Pembangunan tingkat daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode 1 tahun. Selanjutnya, guna menjabarkan rencana pembangunan jangka

menengah dan rencana kerja pemerintah daerah periode tahunan menjadi lebih operasional, maka rencana-rencana tersebut perlu diturunkan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah periode 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah periode 1 tahun.

Dalam konteks Kota Cimahi, RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 telah disusun untuk mencapai visi jangka panjang melalui beberapa pentahapan visi per lima tahun, dan untuk itu disusunlah RPJMD Kota Cimahi (RPJMD yang terakhir kali disusun adalah periode 2017-2022). Selanjutnya dari RPJMD tersebut diturunkan menjadi perencanaan tahunan dalam bentuk RKPD. Seiring dengan disusunnya RPJMD, berbagai misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang termuat di dalamnya diturunkan menjadi Renstra perangkat daerah, dalam hal ini Renstra Sekretariat Daerah, sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang ada di lingkup Sekretariat Daerah tersebut. Begitu juga RKPD Kota Cimahi yang dijabarkan menjadi berbagai Renja tahunan masing-masing perangkat daerah, dalam hal ini Renja Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada pelaksanaannya, hubungan antar berbagai perencanaan ini bersifat dinamis (terbuka terhadap perbaikan atau penyesuaian), bergantung dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, sumber daya yang tersedia juga berbagai faktor lainnya yang menentukan.

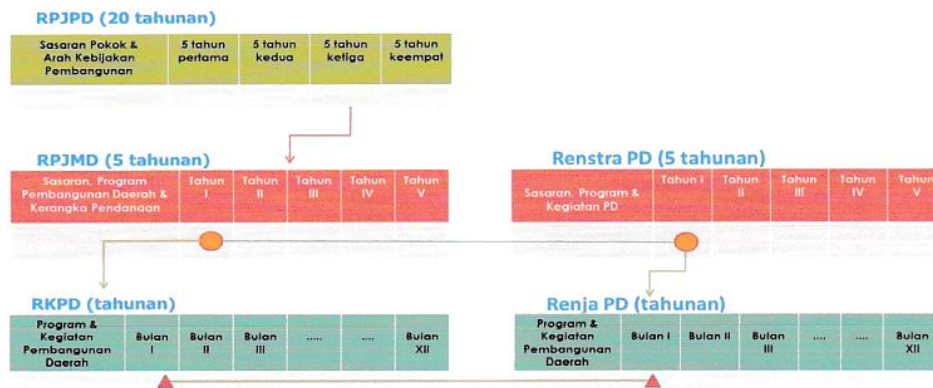
Substansi program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, banyak dipengaruhi oleh terjadinya pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease-2019*) yang melanda Indonesia pada awal Tahun 2020. Kondisi tersebut mempengaruhi turunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi, sehingga menuntut Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengelolaan anggaran belanja. Selain itu, dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, menyebabkan nomenklatur program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 ini merupakan dasar penyusunan dokumen penganggaran selanjutnya, yakni Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

Gambar 1.1

KONSISTENSI DAN SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Sumber: simrenda.cimahikota.go.id

Diagram diatas memberikan gambaran keterkaitan antara Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat daerah. Seperti yang dipaparkan oleh Nita Yiswa, Tenaga Ahli Perencana dan Kebijakan Publik, pada acara Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi di Cimahi Technopark pada 16 April 2019.

I.2. LANDASAN HUKUM

Di bawah ini merupakan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tak langsung menjadi acuan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 s.d. 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi;

13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan bagi seluruh *stakeholder* dan unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi dalam menyusun berbagai dokumen penganggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 adalah untuk mempermudah seluruh jajaran pelaku kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program-program prioritas dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur untuk mencapai visi dan misi Kota Cimahi 2017-2022 serta tujuan dan sasaran pelayanan Sekretariat Daerah khususnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II. Bab ini memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan evaluasi pencapaian terhadap Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi 2017-2022.

BAB III. Bab ini membahas mengenai tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2021.

BAB IV. Bab ini memuat matriks rencana kerja dan pendanaan tiap unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi tahun 2021.

BAB V. Bab ini memuat catatan penting dan rencana tindak lanjut dari Renja ini.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020

Bab ini membahas evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 dan prakiraan maju Tahun Anggaran 2020 (tahun berjalan). Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengukur pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan mengurai faktor-faktor yang menghambat maupun yang mendorong pencapaian target kinerja. Selanjutnya faktor-faktor tersebutlah yang dijadikan pertimbangan dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat daerah Kota Cimahi tahun 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI 2017-2022

Sub Bab 2.1. membahas evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Untuk memudahkan, pembahasannya dilakukan berdasarkan unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

2.1.1. Bagian Pemerintahan

Dari 8 (delapan) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2019, terdapat 6 (enam) kegiatan yang tingkat realisasinya 100%, 1 (satu) kegiatan yang capaiannya melebihi 100% dan sisanya yaitu 1 (satu) kegiatan tidak dapat dihitung tingkat realisasinya. Kegiatan yang tingkat realisasinya tepat 100% adalah: Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH yang ada di bawah Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif, kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (BBGRM Dan BSMSS) dan kegiatan Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan yang berada di bawah Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen, kegiatan Fasilitasi Konflik-

Konflik Pertanahan dan kegiatan Penataan Batas Wilayah yang keduanya berada di bawah Program Pengelolaan Pertanahan dan kegiatan Pelaksanaan Desk Pilkada yang berada di bawah Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sementara kegiatan yang capaiannya lebih dari 100% adalah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang berada di bawah Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif. Realisasi kegiatan tersebut adalah 4 (empat) dokumen, sementara targetnya adalah 3 (tiga) dokumen. Dan kegiatan yang tidak dapat dihitung tingkat realisasinya adalah kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Publik yang ada di bawah program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif, yang disebabkan target Renja Tahun 2019 tidak tercantum angka, sehingga walaupun realisasinya adalah 775 nota kesepahaman.

Sementara itu, dalam hal pengukuran realisasi kinerja akumulatif (tahun 2018 sampai dengan tahun berjalan) terhadap target Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi 2017-2022, tolak ukur kewajaran adalah rata rata tingkat realisasi 50%. Tingkat realisasi tersebut diasumsikan dari realisasi akumulatif rata-rata pada pertengahan tahun 2017-2022 (pertengahan Tahun 2020), yakni setengah dari target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Dengan asumsi itu, maka terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasi capaian kinerja akumulatifnya di bawah 50%, sisanya lebih dari 50%. Kegiatan yang capaian realisasi kinerjanya di bawah 50% adalah Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH yang berada di bawah Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif, dengan realisasi capaian kinerja akumulatif sebesar 44%. Perlu diketahui, walau capaian realisasi kinerja akumulatifnya di bawah 50%, namun angka realisasi kegiatan tersebut tidak

terlampau jauh di bawah 50%. Penyebabnya adalah realisasi capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2020 yang baru mencapai 2 Rakor (Rapat Koordinasi). Target kegiatan ini secara akumulatif selama 5 (lima) tahun adalah 50 kegiatan Rakor, yang dibagi rata setiap tahunnya, yakni 10 (sepuluh) Rakor per tahun. Capaian realisasi kinerja Pada 2018 dan 2019 masing-masing 10 (sepuluh) rakor, sementara capaian realisasi kinerjanya pada Tahun Anggaran 2020 adalah 2 (dua) Rakor.

Sementara itu kegiatan yang capaian realisasi kinerja akumulatifnya di atas 50% terdapat 7 (tujuh) kegiatan. Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Publik, capaian realisasi kinerja akumulatifnya adalah 78%, dengan capaian akumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2020 mencapai 1.557 nota kesepahaman yang dibahas di Tim Koordinasi Kerja sama daerah (TKKSD). Target akhir kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2022 adalah 2.000 nota kesepahaman, namun karena target kegiatan ini sulit diprediksi (tergantung dari permohonan atau usulan pembahasan kerjasama dari perangkat daerah), maka seringkali realisasinya lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Pada Tahun Anggaran 2020 ini, Bagian Pemerintahan mulai merencanakan penyusunan kebutuhan/potensi kerja sama daerah, sehingga dengan adanya data potensi itu, diharapkan di waktu yang akan datang, realisasi kinerjanya dapat lebih terprediksi. Kegiatan Koordinasi Laporan Pertanggungjawaban juga capaian realisasi kinerja akumulatifnya sebesar 76%. Target kinerja kegiatan ini setiap tahun rata-rata hampir serupa: yaitu berupa dokumen yang terdiri dari LKPJ, Dokumen LPPD dan ILPPD. Namun pada Tahun Anggaran 2019, terdapat 1 (satu) keluaran tambahan yang terkait dengan kegiatan bimbingan teknis penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD, sehingga keluaran Tahun Anggaran 2019 (4 dokumen) lebih besar dari targetnya (3 dokumen)

dan akibatnya, capaian kinerja akumulatifnya pun lebih tinggi dari 50%.

Kegiatan selanjutnya adalah Pelaksanaan Desk Pilkada yang berada di bawah Program Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang realisasi capaian kinerja akumulatifnya mencapai 100%, karena kegiatan ini memang hanya dianggarkan pada Tahun Anggaran 2019 saja dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2020, sebab pelaksanaan pemilihan umum memang hanya berlangsung pada tahun itu.

Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (BBGRM dan BSMSS) yang berada di bawah Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen, capaiannya jauh di atas 50%, yaitu 300%. Hal ini disebabkan pencantuman target akumulatif (target akhir Renstra pada 2022) tidak dijumlahkan secara akumulatif, sehingga target kegiatan yang setiap tahunnya berjumlah 2 (dua) lokasi, pada akhir tahun bukan berjumlah 10 (sepuluh) lokasi, melainkan tetap 2 (dua) lokasi. Hal ini mengakibatkan realisasi capaian kinerja akumulatif dari Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 adalah 6 (enam) lokasi, sementara target akhir Renstra tetap 2 (dua) lokasi sehingga capaian kinerja akumulatifnya sangat tinggi yaitu 300%. Kegiatan lain yang capaian kinerjanya juga jauh di atas 50% adalah kegiatan Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan yang berada di bawah Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen/Program Pengelolaan Pertanahan, yakni 200%. Penyebab tingginya capaian kinerja kegiatan ini hampir sama dengan sebelumnya, yakni target akhir Renstra yang tidak dijumlahkan secara akumulatif. Kegiatan ini bersifat rutin dilakukan setiap tahunnya di 312 RW se-Kota Cimahi, namun target akhir jangka lima tahunnya, tetap berjumlah 312 RW. Namun demikian, pada Tahun

Anggaran 2020 ini capaian kinerjanya 0 (nol) dan target tahunannya pun berubah drastis, dari 312 RW menjadi 40 RW, karena rasionalisasi anggaran akibat pandemi Covid-19. Kegiatan Fasilitasi Konflik-Konflik Pertanahan dan Kegiatan Penataan Batas Wilayah yang keduanya berada di bawah Program Pengelolaan Pertanahan, realisasi capaian kinerjanya juga termasuk tinggi, masing-masing 150% dan 200%. Untuk kegiatan Kegiatan Fasilitasi Konflik-Konflik Pertanahan, penyebabnya masih serupa dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, yakni target akhir Renstra yang tidak akumulatif menjumlahkan target tahunan yang berjumlah 4 (empat) kegiatan fasilitasi konflik pertanahan. Walaupun demikian, pada Tahun Anggaran 2020, target tersebut dikurangi menjadi 2 (dua) kegiatan fasilitasi, disebabkan adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi Covid-19. Kegiatan Penataan Batas Wilayah pun mempunyai sebab yang sama, yakni karena target akhir Renstra tidak dijumlahkan secara akumulatif. Pada Tahun Anggaran 2020, beberapa sub kegiatannya tidak dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi Covid-19, sehingga target Tahun Anggaran 2020 menjadi 1 (satu) kegiatan, yakni Sosialisasi Penegasan Batas antar RW di Kelurahan-kelurahan.

2.1.2. Bagian Hukum

Dari 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Hukum pada Tahun Anggaran 2019, terdapat 4 (empat) kegiatan yang tingkat realisasinya 100%, sementara 2 (dua) kegiatan lainnya mempunyai tingkat realisasi yang bervariasi. Kegiatan yang tingkat realisasinya tepat 100% adalah: Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham), Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kajian Peraturan Perundangan-Undangan Daerah dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan yang semuanya berada di bawah Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif. Sementara kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan, tingkat realisasinya sebesar

117%, yang terdiri dari capaian Jumlah Keputusan dan Workshop sebanyak 173.93%, Jumlah Peraturan Wali Kota sebesar 108% dan Jumlah Raperda sebesar 69.57%. Bervariasinya tingkat realisasi kegiatan ini disebabkan oleh jumlah penyusunan SK (Surat Keputusan), Perda (Peraturan Daerah) dan Perwal (Peraturan Wali Kota) yang tidak dapat diprediksi setiap tahunnya. Kegiatan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya pun mempunyai tingkat realisasi rata-rata 169%, yang terdiri dari tingkat realisasi sub kegiatan Jumlah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat sebesar 0.00%, Jumlah Legal Memorandum sebanyak 33.33%, Jumlah Pembahasan Permasalahan Hukum sebesar 130.00%, Jumlah Penanganan Permasalahan Hukum sebesar 200.00% dan Jumlah Pendampingan Saksi sebesar 483.33%. Tingkat realisasi Jumlah Bantuan Hukum yang 0% disebabkan saat ini di Kota Cimahi belum ada organisasi/lembaga bantuan hukum selaku pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Cimahi yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sementara penyebab tingkat realisasi Jumlah Pembahasan dan Penanganan Perkara Hukum yang di atas 100% adalah 1. Jumlah Permasalahan dan Perkara hukum yang ditangani oleh Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi tidak dapat di prediksi secara akurat hal ini menyebabkan perbedaan yang signifikan antara jumlah saat perencanaan dengan realisasi. 2. Tidak semua penanganan permasalahan hukum berbasis anggaran namun dikarenakan penanganan permasalahan hukum dimaksud merupakan bagian dari tugas dan fungsi Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM serta diamanatkan oleh Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Permasalahan Hukum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka penanganannya tetap dilaksanakan, hal ini menyebabkan realisasi fisik selalu lebih besar dari realisasi keuangan.

Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, capaian realisasi kinerja akumulatif semua kegiatannya berada di atas 50%. Sebagian besar penyebabnya adalah pencantuman target akhir Renstra tidak menjumlahkan target tahunan secara akumulatif. Sebagai contoh kegiatan Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) yang target setiap tahunnya adalah 5 (lima) dokumen dan 1 (satu) kali Rakor, pada target akhir Renstra tercantum jumlah yang sama dengan target tahunan, sehingga bila capaian kinerja akumulatif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra, hasilnya mencapai 229.17%. Begitu juga yang terjadi dengan kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (tingkat realisasi target akhir Renstra mencapai 205.88%), kegiatan Kajian Peraturan Perundangan-Undangan Daerah (dengan tingkat realisasi target akhir Renstra 200.00%), kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (dengan tingkat realisasi target akhir Renstra 500.19%), kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya (dengan tingkat realisasi target akhir Renstra 409.09%), kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan (tingkat realisasi target akhir Renstra mencapai 260.00%). Yang membuat angka tingkat realisasi terhadap target akhir Renstra tersebut bervariasi di setiap kegiatannya adalah capaian kinerja kegiatan pada tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020), yang belum mencapai target Tahun Anggaran 2020 karena pelaksanaan kegiatan terkendala oleh adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi Covid-19.

2.1.3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Dari 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Tahun Anggaran 2019, semua kegiatan mencapai tingkat realisasi kinerja sampai 100%. Kegiatan Fasilitasi

Kegiatan Bidang Keagamaan mencapai targetnya yaitu 30 (tiga puluh) kegiatan, Kegiatan Pelayanan Kegiatan Bidang Keagamaan mencapai target awalnya, yakni 20 (dua puluh) kegiatan, dan Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama juga mencapai target kinerjanya yakni 5.980 masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keagamaan. Begitu juga dengan sifat kegiatan yang terkait dengan sinergitas dengan berbagai bidang: kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga mencapai target kinerjanya yaitu terselenggaranya 16 (enam belas) kegiatan yang tersinergikan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan mencapai target kinerja yaitu 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang tersinergikan di Bidang Kesehatan, Kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai target awalnya yakni 8 (delapan) kegiatan yang tersinergikan di Bidang Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial Kemasyarakatan. Jumlah kegiatan yang tersinergikan di Bidang Sosial Kemasyarakatan juga mencapai target kinerjanya yakni 14 (empat belas) kegiatan.

Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, capaian realisasi kinerja akumulatif semua kegiatannya berada di atas 50%. Sebagian besar penyebabnya adalah pencantuman target akhir Renstra tidak menjumlahkan target tahunan secara akumulatif. Misalnya kegiatan Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan yang target setiap tahunnya adalah 30 (tiga puluh) kegiatan, pada target akhir Renstra tercantum jumlah yang sama dengan target tahunan yakni 30 (tiga puluh) kegiatan, sehingga bila capaian kinerja akumulatif dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra, hasilnya mencapai 170 %. Begitu juga yang terjadi

dengan kegiatan Pelayanan Kegiatan Bidang Keagamaan (tingkat realisasi target akhir Renstra mencapai 323.68%, kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Agama (tingkat realisasi target akhir Renstra mencapai 143.11%), kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga (tingkat realisasi target akhir Renstra mencapai 185.00%), kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan (tingkat realisasi target akhir Renstra mencapai 197.22%), Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (tingkat realisasi target akhir Renstra mencapai 192.86%), kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial Kemasyarakatan (tingkat realisasi target akhir Renstra mencapai 206.67%).

2.1.4. Bagian Administrasi Perekonomian

Dari 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Perekonomian pada Tahun Anggaran 2019, semua kegiatan tidak ada yang mencapai target tepat 100%. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang tingkat realisasi capaian kinerjanya di atas 100%, yakni Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pangan, sementara 3 (tiga) kegiatan lainnya mempunyai tingkat realisasi kinerja di bawah 100%. Tingginya tingkat realisasi kinerja Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pangan disebabkan jumlah dokumen yang dihasilkan, yakni 3 (tiga) dokumen, melebihi target awalnya yakni 1 (satu) dokumen. Sementara Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian rata-rata tingkat realisasinya adalah 82,5%, dengan rincian sebagai berikut: realisasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian adalah 66 (enam puluh enam) kali rapat, melebihi target awalnya yakni 60 (enam puluh) kali rapat, realisasi penyusunan Dokumen Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah dan realisasi Jumlah Monitoring BUMD semuanya sesuai dengan target awalnya, masing-masing 1 (satu) buah dokumen dan 1 (satu) kali monitoring BUMD, sementara realisasi monitoring Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Program

CSR/TJSL hanya 3 (tiga) perusahaan dari target 15 (lima belas) perusahaan. Selanjutnya kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif, realisasinya hanya 1 (satu) dokumen penyusunan kebijakan, dari target awal yaitu 3 (tiga) dokumen penyusunan kebijakan. Dan terakhir, kegiatan Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal, tidak ada capaian kinerja dari target awalnya yaitu 2 (dua) jumlah lembaga keuangan yang melaksanakan MOU. Penyebab tidak tercapainya target kegiatan tersebut adalah masih belum terlaksananya kerjasama dengan Bank BRI terkait dengan akses program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, capaian realisasi kinerja akumulatif kegiatan-kegiatan tersebut di atas mempunyai hasil yang bervariasi. Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pangan, realisasi capaian kinerja akumulatifnya adalah 300%, karena dalam jangka waktu 2017-2022, kegiatan ini hanya direncanakan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 saja, sehingga target akhir Renstra adalah 1 (satu) dokumen, sama dengan target Tahun Anggaran 2019. Sementara itu capaian kinerja akumulatif kegiatan Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian rata-rata mencapai 57, 6%. Hal ini disebabkan, selain ada beberapa indikator kegiatan yang tidak tercapai, pada tahun tertentu, pada Tahun Anggaran 2020 ini ada beberapa hambatan pelaksanaan kegiatan karena terjadinya pandemi Covid-19. Sementara itu kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan kegiatan Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal walaupun realisasi capaian kegiatan akumulatifnya masing-masing adalah 101 (seratus satu) laporan rapat penyusunan kebijakan dan 1 (satu) laporan monitoring perusahaan yang melakukan CSR, namun karena

tidak ada angka yang dicantumkan pada target akhir Renstra, maka tingkat realisasi kegiatan akumulatifnya tidak dapat dihitung.

2.1.5. Bagian Administrasi Pembangunan

Dari 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Pembangunan pada Tahun Anggaran 2019, semua kegiatannya mencapai target kinerja 100%. Kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan dapat mencapai target tahunannya yaitu penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di seluruh perangkat daerah selama 12 (dua belas) bulan, dan kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja juga dapat mencapai targetnya.

Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, capaian realisasi kinerja akumulatif kegiatan-kegiatan tersebut di atas mempunyai hasil yang bervariasi. Kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan, walau capaian kinerja akumulatifnya sampai dengan tahun berjalan adalah 33 (tiga puluh tiga) realisasi capaian kinerja akumulatifnya tidak dapat dihitung karena tidak ada angka tercantum pada target akhir Renstra. Sementara itu kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja capaian kinerja akumulatifnya adalah 16 dokumen, atau 133,33% dari target akhir Renstra. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sewajarnya capaian akumulatif sampai dengan tahun berjalan ini adalah sekitar 50%, namun kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja ini capaian kinerja akumulatifnya jauh di atas 50% karena target akhir Renstra tidak dijumlahkan secara akumulatif. Di luar itu, terdapat pengaruh dari variasi target kinerja setiap tahunnya, pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2020, target kinerjanya adalah 3 (tiga) dokumen.

2.1.6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2019, semua kegiatannya

mencapai target kinerja 100%. Kegiatan Pelayanan Pengadaan mencapai targetnya yaitu terselenggaranya kegiatan pelayanan pengadaan selama 12 (dua belas) bulan, begitu juga kegiatan Perencanaan Dan Pembinaan Pengadaan dan kegiatan Teknologi Informasi Dan Pelaporan Pengadaan yang masing-masing target kinerjanya 12 (dua belas) bulan.

Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, capaian realisasi kinerja akumulatif kegiatan-kegiatan tersebut hasilnya seragam, yakni 250%. Realisasi capaian kinerja akumulatif ini jauh lebih besar dari 50%, karena target akhir Renstra tidak menjumlahkan target kinerja tahunan secara akumulatif. Namun di luar itu, dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sifatnya rutin setiap tahunnya, dan realisasinya target kinerjanya pun relatif dapat dicapai secara tepat waktu.

2.1.7. Bagian Organisasi

Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Organisasi pada Tahun Anggaran 2019, semua kegiatannya mencapai target kinerja 100%. Kegiatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah mencapai target tahunannya 100% yang terdiri dari dokumen SAKIP sebanyak 7 dokumen, dokumen Evaluasi Jabatan sebanyak 1 (satu) dokumen sudah tercapai berupa Peraturan Wali Kota Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Evaluasi SAKIP sesuai Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2020 jumlah dokumen Akip 7 dokumen, dokumen Evaluasi Jabatan 1 dokumen dan dokumen Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 1 dokumen. Sementara Kegiatan Penataan Kelembagaan juga mencapai target kinerja sebanyak 100%, yang terdiri dari: terfasilitasinya Forsesdasi sebanyak

1 (satu) kegiatan, tersusunnya Dokumen Kajian Kelembagaan sebanyak 1 (satu) dokumen, dan dokumen Analisa Standar Kompetensi Jabatan sebanyak 1 dokumen, Dokumen Analisis Beban Kerja sebanyak 1 (satu) dokumen. Selanjutnya, kegiatan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pun mencapai target kinerjanya sebanyak 100% yang terdiri dari: 1 (satu) dokumen Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) dari 45 Perangkat Daerah dengan nilai IKM kota 80,9, terinventarisirnya data Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar pelayanan (SP) serta terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, capaian realisasi kinerja akumulatif kegiatan-kegiatan tersebut di atas mempunyai hasil yang bervariasi. Kegiatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah mempunyai tingkat capaian realisasi akumulatif sebanyak 270% (terdiri dari capaian kinerja tahun 2018 dan 2019 masing-masing 100% dan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 70%) , besarnya angka capaian ini disebabkan oleh target akhir Renstra tidak menjumlahkan target kinerja tahunan secara akumulatif. Sementara capaian kinerja akumulatif kegiatan Penataan Kelembagaan tidak dapat dihitung, karena perbedaan indikator. Pada Tahun Anggaran 2018 indikator kegiatan ini adalah Nilai B, sementara pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 indikator kegiatannya berupa persentase, sehingga menyebabkan capaian akumulatif kinerjanya tidak dapat dijumlahkan. Terakhir, kegiatan Penataan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik juga capaian indikator akumulatifnya adalah 300 %, karena pada target akhir Renstra tidak menjumlahkan target kinerja tahunan secara akumulatif (100%), sementara capaian kinerja setiap tahunnya dijumlahkan secara akumulatif (300%).

2.1.8. Bagian Umum dan Protokol

Dari 21 (dua puluh satu) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Umum dan Protokol pada Tahun Anggaran 2019, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang capaian kinerjanya di bawah 100%, 11 (sebelas) kegiatan tepat mencapai 100%, 5 (lima) kegiatan yang capaian kinerjanya di atas 100% dan sisanya sebanyak 2 (dua) kegiatan tidak dapat dihitung capaian kinerjanya. Kegiatan yang capaiannya di bawah 100%, seperti kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Meubeleur Kantor, Pengadaan Seragam Pegawai dan Kegiatan Penyediaan Media Massa, Barang Cetak dan Penggandaan, disebabkan oleh perubahan target kinerja akibat rasionalisasi anggaran. Sementara itu, kegiatan yang capaiannya di atas 100% terdiri dari Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah (165%), Kegiatan Penyediaan Tenaga Pengemudi dan Pramubakti KDH dan Wa.KDH (110%), Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor (250%), Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (295.24%), dan Penyediaan Makanan Dan Minuman (125%). Salah satu penyebab tingginya capaian kinerjanya adalah adanya perubahan kebutuhan sehingga menyebabkan perubahan target kinerja pada perubahan anggaran, misalnya pada Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Kantor yang mengalami perubahan sebanyak 10 (sepuluh) paket dan Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman yang mengalami penambahan target sebanyak 160 kegiatan. Adapun kegiatan yang tidak dapat dihitung kegiatannya terdiri dari Kegiatan Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat dan Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Dinas, yang disebabkan tidak tercantumnya target kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada dokumen Renja.

Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, capaian realisasi kinerja akumulatif kegiatan-kegiatan tersebut

mempunyai hasil yang bervariasi, terdapat 4 (empat) kegiatan yang capaian kinerja akumulatifnya di bawah 50%, 16 (enam belas) kegiatan yang capaian kinerja akumulatifnya di atas 50% dan sisanya sebanyak 1 (satu) kegiatan tidak dapat dihitung capaian kinerja akumulatifnya. Kegiatan yang capaian kinerja akumulatifnya di bawah 50% antara lain: Penyediaan Seragam Beserta Perlengkapannya KDH Dan Wa.KDH (capaian kinerja akumulatif sebesar 42,5%), sedangkan Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Meubelur Kantor, Pengadaan Seragam Pegawai dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kesemuanya mempunyai capaian kinerja akumulatif sebanyak 0%. Untuk Kegiatan Penyediaan Seragam Beserta Perlengkapannya KDH dan Wa.KDH, rendahnya capaian kinerja akumulatif kegiatan ini diakibatkan rendahnya realisasi kinerja setiap tahunnya, dibanding target kinerja, sementara 3 (tiga) kegiatan lainnya yang capaian kinerjanya 0%, diakibatkan adanya rasionalisasi anggaran sehingga mengakibatkan perubahan target kinerja. Adapun kegiatan yang tidak bisa dihitung capaian kinerja akumulatifnya (yaitu kegiatan Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Dinas), disebabkan tidak tercantumnya target akhir Renstra, sehingga walau kegiatan ini mempunyai keluaran (output), namun tingkat realisasi capaian kinerjanya tidak dapat dihitung.

Sementara itu 16 (enam belas) kegiatan yang capaian kinerja akumulatifnya di atas 50%, kesemuanya disebabkan karena target akhir Renstra tidak menjumlahkan secara akumulatif target tahunan dari Tahun 2017 sampai dengan 2022. Dan yang terakhir, capaian akumulasi kinerja kegiatannya yang tidak dapat dihitung, yaitu kegiatan Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Dinas, disebabkan karena tidak ada target yang tercantum pada target akhir Renstra, walaupun capaian kinerja akumulatifnya mencapai 16 (enam belas) paket.

2.1.9. Bagian Tata Usaha

Dari 8 (delapan) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Tata Usaha pada Tahun Anggaran 2019, terdapat 2 (dua) kegiatan yang

capaian kinerjanya di bawah 100%, 4 (empat) kegiatan yang capaian kinerjanya tepat 100% dan sebanyak 2 (empat) kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi 100%. Kegiatan yang capaiannya di bawah 100%, seperti kegiatan Fasilitasi Persuratan Pimpinan Daerah (capaian kinerja 96%) dan kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai (capaian kinerja 91,5%) , capaian kinerjanya berada sedikit di bawah target kinerja, karena realisasi kinerjanya sulit dipastikan untuk benar-benar sesuai dengan target kinerja (seperti jumlah surat masuk dan surat keluar yang sulit diprediksi setiap tahunnya). Kemudian capaian kinerja yang berada di atas 100%, adalah sebagai berikut: kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan (capaian kinerjanya 178.80%), Kegiatan Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD (capaian kinerja 216.67%), kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan (capain kinerja 174.97%), kegiatan Penyusunan Renstra Dan Renja PD (capain kinerja 450%).

Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, capaian realisasi kinerja akumulatif kegiatan-kegiatan tersebut di atas mempunyai hasil yang bervariasi, terdapat 1 (satu) kegiatan yang capaian kinerja akumulatifnya di bawah 50%, selebihnya sebanyak 7 (tujuh) kegiatan mempunyai capain kinerja akumulatif di atas 50%. Kegiatan yang capaian kinerja dasarnya di bawah 50%, adalah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan, yang capaian kinerja akumulatifnya 46.67%, yang sebenarnya tidak jauh capaiannya dari capaian kinerja akumulatif yang wajar di pertengahan Tahun 2020 ini yaitu 50%, selisih sedikit di bawah target 50% tersebut disebabkan oleh relatif rendahnya capaian kinerja pada Tahun 2020 ini, yaitu pemenuhan bahan bacaan dan peraturan-perundang-undangan yang baru mencapai 4 (empat) bulan. Sementara kegiatan yang capain kinerja akumulatifnya jauh di atas 50%, kesemuanya disebabkan karena target akhir Renstra tidak

menjumlahkan secara akumulatif target tahunan dari tahun 2017 sampai dengan 2022, sehingga capaian kinerja akumulatif masing-masing kegiatan itu jauh lebih besar dibanding target akhir Renstra. Hal ini terjadi pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai (capaian kinerja akumulatif 91.50%), kegiatan Penyusunan Renstra Dan Renja PD (capaian kinerja akumulatif 700%), kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan (capaian kinerja akumulatif 380.12%), kegiatan Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD (capaian kinerja akumulatif 316.67%), Kegiatan Fasilitasi Persuratan Pimpinan Daerah (capaian kinerja akumulatif 227.27%), Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan (capaian kinerja akumulatif 363.20), dan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik Dan Air (capaian kinerja akumulatif 250.00%).

**Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020
Bagian Pemerintahan**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DIKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	Persentase Kerjasama Daerah Yang Terasiliasi	100.00%	0.63%	38.17%	-	22.35%	77.02%	66.11%
Kegiatan: Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Rakor Kewilayahan	50	10	10	100%	8	22	44%
Facilitasi /Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Publik	Jumlah Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerjasama / NHPD yang dibahas di forum TKKSD	2000	0	775	-	450	1557	78%
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Jumlah dokumen	17	3	4	133%	4	13	76%

Usulan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	Persentase Penegasan Batas Daerah Yang Telah Diidentifikasi/ Persentase Penyelesaian Konflik Dan Sengketa Tanah Yang Difasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	71.43%	171.43%	175.00%
Fasilitasi Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang difasilitasi	4	4	4	100%	4	6	150%
Penataan Batas Wilayah	Persentase penegasan batas daerah yang telah diidentifikasi	3	3	3	100%	1	6	200%
PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	80.00%	80.00%	80%	80%	0%	80%	80%
Pelaksanaan Desk Pilkada	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/ jumlah kegiatan	1	1	1	100%	-	1	100%

**Tabel. 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020
Bagian Hukum**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM KEBJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	Meningkatnya Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan/ Cakupan Peraturan Yang Telah Dikaji Dan Ditegakkan	100.00%	100%	170%	120.96%	-	492%	300.72%
	Jumlah dokumen laporan Ranham	4	4	4	100.00%	4	13.75	229.17%
	Jumlah dokumen penilaian Kota Peduli HAM	1	1	1	100.00%	1		
Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham)	Jumlah rakor sosialisasi Ranham	1	1	1	100.00%	1		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyuluhan hukum	17	17	17	100.00%	3 kecamatan 2 sekolah	35	205.88%
	Jumlah kajian	3	3	3	100.00%	3	6	200.00%
	Jumlah keputusan dan workshop	1500	1,500	2609	173.93%	1,500	7,868	500.19%
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Wali Kota	50	50	54	108.00%	50		
	Jumlah Raperda	23	23	16	69.57%	22		
	Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat	5	5	0	0.00%	4	180	409.09%
Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	Jumlah legal memorandum	6	6	2	33.33%	3		
	Jumlah pembahasan permasalahan hukum	20	20	26	130.00%	16		
	Jumlah penanganan permasalahan hukum	1	1	2	200.00%	1		

Tabel. 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM KEBUJUKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi	97	85.85%	85.85%	100.00%	95.34%	144.81%	202.65%
Facilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan	Jumlah fasilitas kegiatan bidang keagamaan	30	30	30	100.00%	32	51	170.00%
Pelayanan Kegiatan Bidang Keagamaan.	Jumlah layanan kegiatan keagamaan	38	20	20	100.00%	38	123	323.68%
Peningkatan Pemahaman Dan Pergamalan Agama	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keagamaan	6957	5980	5980	100.00%	6.640	9956	143.11%
Sinergitas Pelaksanaan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga.	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang kepemudaan dan olahraga	20	16	16	100.00%	15	37	185.00%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang kesehatan	36	36	36	100.00%	29	71	197.22%
Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang pengendalian penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	14	8	8	100.00%	13	27	192.86%
Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial Kemasyarakatan.	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang sosial kemasyarakatan	15	14	14	100.00%	12	31	206.67%

Tabel. 2.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020 Bagian Administrasi Perekonomian

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian	100.00%	23.51%	21.25%	94.76%	24.36%	77.34%	-
	Jumlah dokumen	1	1	3	300.00%	-	3	
	Cakupan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian	240	60	66	110.00%	60	141	58.75%
	Dokumen Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	6	1	1	100.00%	2	3	50.00%
	Jumlah Monitoring BUMD	1	1	1	100.00%	1	1	100.00%
Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Program CSRT/JSL	105	15	3	20.00%	20	23	21.90%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kebijakan	0	3	1	33.33%	1	101	-
Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah Lembaga Keuangan Yang Melaksanakan MOU	0	2	0	0.00%	2	1	-

**Tabel. 2.5. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020
Bagian Administrasi Pembangunan**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH: KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Yang Dimonitoring Dan Evaluasi	100.00%	200.00%	100.00%	100.00%	750.00%	326.67%	-
Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah bulan	0	12	12	100.00%	12	33	-
Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah dokumen standar belanja/ jumlah bulan	12	12	12	100.00%	3	16	133.33%

**Tabel. 2.6. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Setda Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun Berjalan	
		Target Renja Setda Tahun 2019	Realisasi Renja Setda tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF/ PROGRAM PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
Pelayanan Pengadaan	Persentase Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Terfasilitasi/ Persentase Pelaksanaan Perencanaan Yang Dimonitoring Dan Evaluasi	100%	100%	100.00%	100%	250%	250.00%
Perencanaan Dan Pembinaan Pengadaan	Jumlah bulan	12	12	100.00%	12	30	250.00%
Teknologi Informasi Dan Pelaporan Pengadaan	Jumlah bulan	12	12	100.00%	12	30	250.00%
	Jumlah bulan	12	12	100.00%	12	30	250.00%

**Tabel. 2.7. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020
Bagian Organisasi**

Usran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM KEBIJAKAN DAERAH, KOORDINASI, PEMBINAAN, DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF	Terwujudnya Kelembagaan Dan Tata Laksana Pemerintah Yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran Dan Tepat Proses: (1)Nilai Komponen Pelaporan LKIP Kota (2)Persentase PD Yang Memiliki Evaluasi Jabatan Yang Baik (3)Persentase PD/Unit Pelayanan Publik Yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	(1)100 Persen; (2)100 Persen; (3)50 Persen;	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%	-	-
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	270.00%	270.0%
Penataan Kelembagaan	Jumlah dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
Penataan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	300.00%	300.0%

**Tabel. 2.8. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020
Bagian Umum Dan Protokol**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program Dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah S/D Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif	Persentase Kegiatan Kdhd Dan Wakdhd Yang Terfasilitasi	100.00%	75.09%	86.76%	107.50%	77.87%	177.53%	164.88%
Dialog / Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat	Jumlah Dialog	78	78	78	100.00%	78	186	238.46%
Fasilitasi Kegiatan Harian Dan Hari Besar	Jumlah Kegiatan Yang Difasilitasi	104	134	134	100.00%	134	179	172.12%
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Kegiatan	165	100	165	100.00%	100	360	218.18%
Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah Inspeksi	48	48	48	165.00%	48	114	237.50%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program Dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah S/D Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah Kunjungan	25	25	25	100.00%	25	60	240.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kdh Dan Wakdh	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik	12	12	12	100.00%	12	18	150.00%
Penyediaan Rumah Dinas Kdh Dan Wakdh	Jumlah Unit Rumah Dinas	2	2	2	100.00%	2	2	100.00%
Penyediaan Seragam Beserta Perengkapannya KDH dan WAKDH	Jumlah Set Seragam	80	20	22	100.00%	12	34	42.50%
Penyediaan Tenaga Pengemudi Dan Pramubakti KDH dan WAKDH	Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pengemudi Dan Pramubakti	12	12	12	110.00%	12	18	150.00%
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	48	24	24	100.00%	24	48	100.00%

Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program Dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah S/D Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100.00%	44%	95%	-	-	332%	-
Pengadaan Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Bulan	12	12	12	100.00%	12	18	150.00%
Pengadaan Dan Pemeliharaan Meubeleur Kantor	Jumlah Paket	1	1	-	0.00%	1	0	0.00%
Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Paket	4	4	10	250.00%	7	11	275.00%
Pengadaan Seragam Pegawai	Jumlah Set Seragam Pegawai	576	144	0	0.00%	0	0	0.00%
Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Dinas	Jumlah Paket	0	0	9	-	7	16	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket	2	2	2	100.00%	1	5	250.00%
Penyediaan Gudang Kantor	Jumlah Bulan	3	3	3	100.00%	3	5	166.67%

Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program Dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah S/D Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Orang	42	42	124	295.24%	38	232	552.38%
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket	2	2	2	100.00%	1	6	300.00%
Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Kegiatan	128	128	160	125.00%	128	368	287.50%
Penyediaan Media Massa, Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket	4	4	3	75.00%	2	7	175.00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Yang Difasilitasi/ Jumlah Set	1	0	-	-	1	0	0.00%

Tabel. 2.9. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s./d. Tahun Anggaran 2020 Bagian Tata Usaha

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program Dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah S/D Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN Yang Dibina	100.00%	200	183	91.50%	150	183	91.50%
Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai	Jumlah Pegawai/ Jumlah Kegiatan	200	200	183	91.50%	150	183	91.50%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai LAKIP (Indeks)	85	100.00%	175.45%	280.55%	100.48%	380.28%	465.60%
Penyusunan Renstra Dan Renja PD	Jumlah Dokumen	2	2	9	450.00%	10	14	700.00%
Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen	1650	1650	2887	174.97%	1650	6272	380.12%
Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP Dan LPPD PD	Jumlah Dokumen	6	6	13	216.67%	6	19	316.67%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/ Kegiatan (Output))	Target Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program Dan Kegiatan (Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah S/D Tahun Berjalan	
			Target Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100.00%	99.85%	96.50%	118.70%	99.85%	227.99%	221.78%
Fasilitasi Persuratan Pimpinan Daerah	Jumlah Surat Masuk Dan Surat Keluar	32000	32,000	30720	96.00%	32,000	72725	227.27%
Kordinasi Dan Konsultasi Kedinasan	Jumlah Pegawai	250	250	447	178.80%	250	908	363.20%
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan	60	12	12	100.00%	12	28	46.67%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik Dan Air	Jumlah Bulan	12	12	12	100.00%	12	30	250.00%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2019, hampir semuanya mencapai target kinerja 100%, karena rata-rata format program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 bersifat rutin. Di luar program dan kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya mencapai 100%, ada juga beberapa kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya di bawah 100% dan di atas 100%. Penyebabnya kebanyakan adalah indikator kinerja kegiatan yang sulit diprediksi, misalnya kegiatan Legislasi Peraturan perundang-undangan yang diampu Bagian Hukum, dimana jumlah Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang difasilitasi, sulit diprediksi jumlahnya karena tergantung pada kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Begitu juga yang terjadi pada kegiatan Penanganan Kasus Pemerintahan di Bawahnya, khususnya pada sub kegiatan pembahasan dan penanganan permasalahan hukum, yang disebabkan sulitnya memprediksi jumlah kasus hukum yang muncul pada jangka tahun tertentu, karena tentu munculnya kasus hukum berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Hal itu juga terjadi pada beberapa kegiatan yang diampu oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Umum dan Protokol, Bagian Tata Usaha (seperti pada kegiatan Fasilitasi Persuratan Pimpinan Daerah).

Selain dari sifat indikator kegiatan yang sulit diprediksi, ada juga penyebab yang bersifat teknis yang mengakibatkan tingkat realisasi capaian kinerja tidak tepat 100%. Hal ini misalnya terjadi pada Kegiatan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Lokal yang tingkat realisasinya 0% disebabkan terdapat hambatan dalam penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga keuangan yang disepakati yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Terakhir, juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dihitung tingkat realisasi kinerjanya, disebabkan target Renja Tahun 2019 tidak tercantum.

Sementara itu tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, banyak yang masih melebihi capaian yang wajar (sekitar 50%), hal ini sebenarnya disebabkan angka yang dicantumkan pada target Renstra, kebanyakan tidak bersifat akumulatif, sehingga capaian terhadap target Renstra sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020), melebihi 50%.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAH

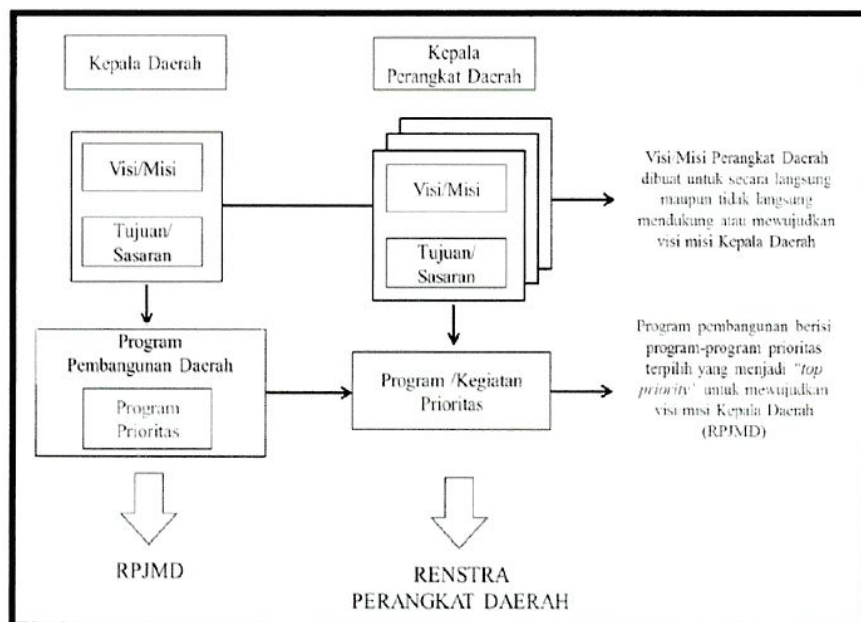
Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah adalah sebuah satuan kerja yang bertugas membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan pemerintahan, mengkoordinasikan organisasi Sekretariat Daerah dan melaksanakan tugas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh pemerintah daerah. Sementara itu gambaran fungsi Sekretariat Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi, juga selaras dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 : 'Sekretariat Daerah dengan Tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah serta pelayanan administratif'.

Dilihat dari gambaran program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi tahun-tahun sebelumnya, ada program dan kegiatan yang bersifat administratif, maupun yang berhubungan dengan fasilitasi penyusunan kebijakan tingkat kota. Gambaran penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah Kota Cimahi tersebut sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah seperti yang tercantum dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, namun demikian dalam penerapannya di tingkat kota diperlukan suatu pemetaan program dan kegiatan agar sinkron dengan tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah lainnya dan juga dapat memperlihatkan dampaknya dalam pencapaian visi dan misi Kota Cimahi. Pemetaan ini perlu dilakukan, karena walaupun Sekretariat Daerah tugas dan fungsinya secara umum bukan bersifat teknis, namun secara umum, seluruh program dan kegiatan dalam pemerintahan daerah harus terlihat pengaruhnya, baik langsung maupun tak langsung, pada pencapaian visi dan misi Kota Cimahi, seperti yang digambarkan pada diagram di bawah ini:

Gambar 2.2.

Hubungan Kinerja antara perencanaan tingkat kota dan tingkat Sekretariat Daerah dalam mencapai visi dan misi kota



Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 juga susunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu oleh Sekretariat Daerah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2021.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI

Berdasarkan arahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 ini adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah, Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi, Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengarusutamaan Gender (seperti tergambar pada tabel 3.1.).

**Tabel 3.1. Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi
Tahun 2017-2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2021
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	ST
		Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	84 SKM
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	SAKIP	A
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	6,6%
3.	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	80%

Sumber: Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Namun demikian, ada sedikit perubahan tujuan dan sasaran dari Renstra Sekretariat Daerah 2017-2022 di atas, menyesuaikan dengan ditiadakkannya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Kebijakan Perberasan yang pada Tahun 2019 yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian. Akibatnya, hal tersebut berpengaruh pada pencapaian program serta tujuan dan sasaran, sehingga tujuan 'Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi' sudah dihapuskan dari IKU Sekretariat Daerah mulai Tahun Anggaran 2020. Oleh karena itu, pada tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2021 pun, tujuan 'Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi' beserta sasaran, indikator sasaran dan target kinerja yang menjadi turunannya, juga ditiadakan (tabel 3.2.).

Tabel 3.2. Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2021
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	ST
		Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	84 SKM
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	SAKIP	A
2.	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	80%

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

Sehubungan dengan adanya ketentuan nomenklatur baru dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 mengalami perubahan besar. Namun demikian, secara garis besar, substansi program dan kegiatan tersebut masih sama dengan substansi program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020. Dan juga, walau tidak terdapat banyak perubahan dalam sunstansi program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2021, namun terdapat perubahan dalam hal jumlah target kinerja dan anggaran, yang utamanya disebabkan oleh rasionalisasi anggaran tingkat kota akibat pandemi Covid-19.

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil pemetaan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdiri dari 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan dengan indikasi pagu anggarannya Rp.57.183.598.735,00 (lima puluh tujuh milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilah puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Cimahi. Berikut adalah uraian rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 yang dipaparkan per bagian.

3.2.1. Bagian Pemerintahan

Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Pemerintahan mengampu 3 (tiga) program, 4 (empat) kegiatan, dan 7 (tujuh) sub kegiatan.

3.2.1.1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

A. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sub kegiatan ini terdiri dari fasilitasi administrasi pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota Cimahi, Wakil Wali

Kota Cimahi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, penyusunan dokumen pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kegiatan fasilitasi Koordinasi Komunikasi Pembangunan Daerah (Kopdar). Kegiatan fasilitasi Kopdar merupakan fasilitasi kebutuhan Wali Kota Cimahi (ataupun pejabat lain yang mewakilinya) dalam menghadiri forum Kopdar, yaitu Forum Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat yang bertujuan menjadi ajang saling berbagi permasalahan daerah dan alternatif solusi pemecahannya. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: penyusunan dokumen keputusan pemberhentian dan pengangkatan KDH dan WAKDH sebanyak 4 (empat) dokumen, penyusunan dokumen keputusan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kota Cimahi sebanyak 2 (dua) dokumen, penyusunan Dokumen Keputusan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Cimahi sebanyak 2 (dua) dokumen, penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 1 (satu) dokumen, dan fasilitasi Koordinasi Komunikasi Pembangunan Daerah (Kopdar) Tingkat Provinsi sejumlah 4 (empat) dokumen.

B. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan

Sub kegiatan ini merupakan wujud dari kewajiban bagi kepala daerah untuk melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan LPPD, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini

adalah sebagai upaya untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun sebelumnya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun target kinerja sub kegiatan ini adalah sebagai berikut: penyusunan dokumen LKPJ Kota Cimahi Akhir Tahun Anggaran 2020, Dokumen LPPD Kota Cimahi Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen RLPPD Kota Cimahi Akhir Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebanyak 1 (satu) dokumen.

C. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Sub kegiatan ini terdiri atas dua substansi sub kegiatan, yaitu Rapat Koordinasi Kewilayahan, Sub Kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dan Sub Kegiatan Evaluasi Sinergitas Kecamatan, yang semuanya bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan dan tahap kemajuan wilayah kelurahan/kecamatan. Dan untuk memberi apresiasi bagi kecamatan yang mempunyai kinerja baik dalam melakukan pelayanan publik, dengan adanya penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong bagi kecamatan untuk mempunyai kinerja yang lebih baik lagi. Sub kegiatan rapat koordinasi kewilayahan dilaksanakan untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program-program pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Cimahi, dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi camat dan lurah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kota Cimahi. Target kinerja sub kegiatan ini adalah sebagai berikut: fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan sebanyak 4 (empat) dokumen, fasilitasi koordinasi kewilayahan sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

2. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

A. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Sub Kegiatan ini merupakan fasilitasi pertemuan Asosiasi Pemerintah Daerah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang merupakan pertemuan tahunan sebagai ajang bertukar informasi dan pengalaman pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah perkotaan yang dihadapi. Koordinasi tersebut dirasa perlu, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks di era globalisasi ini. Ruang lingkup kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 ini meliputi penyusunan dokumen laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sebanyak 3 (tiga) dokumen.

B. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Sasaran sub kegiatan ini adalah memfasilitasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam hal kerja sama antara Pemerintah Kota Cimahi dengan pemerintah daerah lainnya juga dengan pihak ketiga. Kegiatan kerja sama antar daerah dengan pemerintah ini melibatkan Tim Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah (TKKSD) dan pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan pengajuan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan kerja sama. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 ini adalah penyusunan dokumen Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dibahas di forum TKKSD sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) dokumen, penyusunan Dokumen Perjanjian Kerja Sama yang dibahas di forum TKKSD sebanyak 76 dokumen, dan penyusunan Dokumen Nota Kesepahaman yang dibahas di forum TKKSD sebanyak 46 dokumen.

3.2.1.2. Program Pengelolaan Perbatasan

1. Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/Kota

A. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan

Kegiatan ini berupaya untuk melakukan penataan batas-batas antara Rukun Warga (RW) yang dikerjakan dengan metode delienasi garis batas secara kartometrik. Hal ini dilatari kondisi di mana banyak jumlah segmen batas wilayah yang belum ditetapkan secara pasti di lapangan oleh instansi yang berwenang. Dalam konteks Kota Cimahi yang luasnya relatif terbatas, melalui kegiatan ini diharapkan tertib administrasi kewilayahan dapat tertata dengan baik. Ruang lingkup kegiatan penataan batas wilayah pada Tahun Anggaran 2021 adalah penyusunan Dokumen Batas Antar Daerah, Dokumen Batas Antar Kecamatan/ Kelurahan, Dokumen Batas Antar RW/RT, jumlah Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi masing-masing sebanyak 1 (satu) buah dokumen

3.2.1.3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

A. Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilatari kondisi saat ini di mana terjadi peningkatan potensi konflik dan sengketa lahan antar berbagai pemangku kepentingan (lembaga pemerintahan maupun swasta, pengembang maupun orang perseorangan). Peningkatan konflik tersebut disebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan lahan berimplikasi pada nilai tanah yang semakin tinggi secara ekonomi. Dampak dari konflik tersebut dapat merambat kepada terhambatnya kegiatan lain di tataran Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang membutuhkan lahan untuk membangun sarana dan prasarana bagi kepentingan umum. Karena strategisnya isu pertanian

ini, maka diperlukan kegiatan untuk memfasilitasi konflik atau sengketa tersebut. Ruang Lingkup kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 4 (empat) kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan.

3.2.2. Bagian Hukum

Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Hukum mengampu 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan.

3.2.2.1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah

A. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Substansi sub kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), koordinasi sosialisasi RANHAM dan penanganan pembahasan permasalahan hukum. Substansi terkait RANHAM terdiri dari penyusunan dokumen laporan RANHAM dan penyusunan dokumen penilaian Kota Peduli RANHAM. Substansi terkait RANHAM ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah memberikan penugasan yang lebih jelas kepada Kementerian/Lembaga, Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung-jawab pelaksanaan RANHAM. Substansi terkait RANHAM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat, melaksanakan instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah, meningkatkan partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM, meningkatkan penanganan pelanggaran HAM serta meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Sementara itu, substansi terkait penanganan permasalahan hukum terdiri dari bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pembahasan permasalahan hukum dan pendampingan saksi. Substansi bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan upaya bantuan bagi masyarakat Kota Cimahi (melalui organisasi/ lembaga bantuan hukum yang terakreditasi) yang mengalami permasalahan hukum dan tidak mampu mengakses bantuan hukum. Sementara itu substansi pembahasan permasalahan hukum merupakan upaya pemberian bantuan hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang terkena dampak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Tujuan dari kegiatan ini antara lain teratasinya permasalahan hukum yang muncul dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari aparatur maupun institusi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, teratasinya implikasi yuridis yang mungkin muncul dari pengambilan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur serta institusi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pemberian Bantuan Hukum sebanyak 4 (empat) kasus, penyusunan Dokumen Laporan Ranham sebanyak 4 (empat) dokumen, penyusunan Dokumen Penilaian Kota Peduli HAM sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan Legal Memorandum sebanyak 3 (tiga) memorandum, Pembahasan Permasalahan Hukum; sebanyak 15 (lima belas) kasus, Penanganan Perkara Perdata dan atau Tata Usaha Negara oleh lembaga peradilan, sebanyak 1 (satu) kasus, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Sosialisasi RANHAM sebanyak 1 (satu) kegiatan, pendampingan Saksi yang Terkait Permasalahan Hukum Litigasi maupun non-Litigasi sebanyak 5 (lima) kasus.

B. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Sub kegiatan ini dilatari perkembangan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan produk hukum daerah, yang sedang berkembang dengan pesat. Perkembangan perundang-undangan tersebut mengakibatkan disharmoni produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di daerah dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, yaitu timbulnya ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Selain itu, tujuan lain dari sub kegiatan ini adalah tertatanya dan terbentuknya produk hukum daerah berupa program legislasi daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, Keputusan Sekretaris Daerah, serta tersedianya aparatur Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang berkualitas di bidang penyusunan produk hukum daerah melalui workshop. Secara keseluruhan, target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut: Kajian Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 1 (satu) kajian, Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebanyak 750 surat keputusan, Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Berupa Peraturan Kepala Daerah sebanyak 30 peraturan wali kota, fasilitasi Produk Hukum Daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 8 Raperda.

C. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum

Secara garis besar, tujuan sub kegiatan ini berupa pendokumentasian produk hukum dan sosialisasi produk hukum. Sub kegiatan pendokumentasian produk hukum, khususnya dalam format website, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta menjamin terciptanya pengelolaan serta pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab. Sementara sub kegiatan sosialisasi produk hukum berdasar pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan bahwa merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan.

Sementara ruang lingkup Sub Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum terdiri dari Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Hukum, Rapat Persiapan, Penyusunan uraian tugas, Penetapan anggota Tim, Penetapan anggota tim dalam Keputusan Wali Kota, Pelaksanaan Kegiatan, Menyusun bahan evaluasi. Sementara itu, peserta kegiatan sosialisasi terdiri dari berbagai unsur di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat diperlukan agar pemahaman masyarakat mengenai keberadaan peraturan perundang-undangan di Kota Cimahi dapat tercapai. Pranata pendukung pembangunan, seperti adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan

Kota Cimahi diharapkan dapat diimplementasikan dalam membangun kehidupan bermasyarakat di Kota Cimahi serta dalam pelayanan publik terhadap seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: Cetak Bahan Publikasi Perundang-undangan Sebanyak 1 (satu) paket, pencetakan Buku Perda sebanyak 1 (satu) paket, Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Hukum untuk Masyarakat dan Sekolah sebanyak 1 (satu) kegiatan.

3.2.3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mengampu 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan.

3.2.3.1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

1. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

A. Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Substansi sub kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat ini adalah memfasilitasi kegiatan olahraga yang dilakukan para pemuda di Kota Cimahi (khususnya para santri), baik dalam bentuk peningkatan kemampuan maupun dukungan fasilitasi dan koordinasi. Adapun target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: fasilitasi kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga sebanyak 5 (lima) kegiatan, fasilitasi pengiriman peserta bidang kepemudaan dan olahraga sebanyak 2 (dua) kegiatan, penyelenggaraan rapat koordinasi bidang kepemudaan dan olahraga sebanyak 1 (satu) kegiatan.

B. Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Substansi sub kegiatan ini adalah fasilitasi koordinasi di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A), bidang kesehatan dan bidang sosial kemasyarakatan. Sub kegiatan terkait bidang pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan dengan tujuan mensinergikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (KB), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Cimahi. Sementara tujuan sub kegiatan terkait bidang kesehatan ini mempunyai tujuan mensinergikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan dan memfasilitasi TP UKS Kota Cimahi dalam pembinaan dan pengembangan program UKS di setiap jenjang pendidikan dalam rangka keikutsertaan dalam Lomba Sekolah Sehat (LSS) baik di tingkat Kota, tingkat wilayah (BKPP), tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dan substansi sub kegiatan bidang sosial kemasyarakatan bertujuan terkoordinasinya program bidang sosial kemasyarakatan di Kota Cimahi, terfasilitasinya rapat-rapat dan kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan dan meningkatkan wawasan di bidang sosial bagi masyarakat serta terfasilitasinya peningkatan wawasan agar mampu dan mengetahui, serta paham terhadap aturan-aturan organisasi serta berwawasan luas di bidang sosial. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah penyelenggaraan rapat koordinasi bidang P2KBP3A sebanyak 1 (satu) kegiatan, penyelenggaraan rapat bidang P2KBP3A sebanyak 6 kegiatan, penyelenggaraan rapat bidang kesehatan sebanyak 5 (lima) kegiatan, penyelenggaraan rapat koordinasi bidang sosial 1 (satu) kegiatan fasilitasi kegiatan bidang sosial

sebanyak 4 (empat) kegiatan, fasilitasi pengiriman peserta bidang sosial 1 (satu) kegiatan, penyelenggaraan rapat koordinasi bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) kegiatan.

C. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya berbagai kegiatan keagamaan di Kota Cimahi, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam kegiatan keagamaan, meningkatkan nilai-nilai keagamaan di Kota Cimahi, meningkatkan jalinan ukhuwah dan kebersamaan antara sesama aparat pemerintah serta antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya aspek spiritual. Melalui sub kegiatan ini diharapkan terwujud kesalehan sosial yang mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan serta dapat menjadi gerakan moral untuk mewujudkan perilaku saleh secara kolektif, sehingga berdampak bukan saja pada individu tetapi juga masyarakat, sehingga pada akhirnya berdampak pada pencapaian visi Kota Cimahi yakni Cimahi Baru yang Maju, Agamis dan Berbudaya. Ruang lingkup sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: fasilitasi acara istighosah sebanyak 2 (dua) kegiatan, pelaksanaan Kegiatan Idul Fitri sebanyak 1 (satu) kegiatan, fasilitasi Kegiatan Forum Ulama Umaro yang sebanyak 4 (empat) kegiatan, fasilitasi Kegiatan Doa Bersama Anak Yatim dan Dhuafa sebanyak 1 (satu) kegiatan, penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan bidang keagamaan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tilawatil Quran sebanyak 6 (enam) kegiatan, pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi sebanyak 1 (satu) kegiatan, pelaksanaan kegiatan peringatan Isra Miraj sebanyak 1 (satu) kegiatan, pelaksanaan kegiatan peringatan Nuzulul Quran sebanyak 1 (satu) kegiatan, pelaksanaan kegiatan peringatan Tahun Baru Islam sebanyak 1 (satu) kegiatan, pelaksanaan

kegiatan Halal Bihahal Idul Fitri sebanyak 1 (satu) kegiatan, fasilitasi Kegiatan STQ tingkat Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 (satu) kegiatan, pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Kota Cimahi yang sebanyak 1 (satu) kegiatan, fasilitasi kegiatan pengiriman peserta keagamaan sebanyak 5 (lima) kegiatan, fasilitasi kegiatan bidang agama dan pendidikan sebanyak 15 (lima belas) kegiatan, fasilitasi biaya operasional dan transportasi jamaah haji yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan, fasilitasi kegiatan perjalanan Ibadah Haji (TPHD) sebanyak 1 (satu) kegiatan, pelaksanaan kegiatan Idul Adha yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan.

3.2.4. Bagian Administrasi Perekonomian

Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Administrasi Perekonomian mengampu 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan.

3.2.4.1. Program Perekonomian Dan Pembangunan

1. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

A. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah penyusunan dokumen hasil evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD sebanyak 1 (satu) dokumen dan penyusunan dokumen hasil evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD sebanyak 1 (satu) dokumen.

B. Sub Kegiatan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian

Sub kegiatan ini ditujukan untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang ekonomi, karena terdapat masalah masih lemahnya koordinasi lintas sektor terkait, sehingga pelaksanaan kebijakan ekonomi masih

bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan baik. Fungsi koordinasi ini sangat penting dalam mewujudkan sinergitas dalam penyediaan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan dibidang administrasi perekonomian, sehingga pada akhirnya diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi dengan baik di Kota Cimahi. Substansi sub kegiatan ini antara lain terkait dengan upaya pengendalian inflasi daerah, upaya koordinasi ketahanan pangan daerah, dan upaya penyusunan *data base* perusahaan yang melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: penyusunan dokumen kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan laporan hasil fasilitasi kegiatan dewan ketahanan pangan sebanyak 1 (satu) laporan, penyusunan dokumen kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebanyak 1 (satu) dokumen, penyelenggaraan kerja sama dengan Lembaga Keuangan sebanyak 1 (satu) lembaga, Perusahaan yang melaksanakan program CSR/TJSL sebanyak 1 (satu) perusahaan.

C. Sub Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi bagi masyarakat pelaku usaha di Kota Cimahi. Kegiatan ini melingkupi penanganan isu-isu sebagai berikut: bantuan modal bagi koperasi dan UKM, kemudahan perizinan bagi koperasi dan UKM, pelatihan kewirausahaan, penyusunan perda anti rentenir, temu usaha bagi pelaku usaha di Kota Cimahi, fasilitasi akses permodalan ke perbankan dan koordinasi rumusan bahan kebijakan ekonomi lokal di Kota Cimahi melalui rapat koordinasi dalam rangka mensinergikan pelaksanaan program/kegiatan pada perangkat daerah/lembaga/instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan

kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal sesuai dengan tugas dan fungsi serta peranan masing-masing, rapat evaluasi dalam upaya meningkatkan sinergitas diantara para *stakeholders* serta untuk mengetahui tentang sejauhmana capaian kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal termasuk didalamnya kendala/hambatan di lapangan untuk dapat dicarikan solusinya, sehingga pelaksanaan program di Kota Cimahi ke depannya dapat berjalan lebih baik. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah penyusunan Dokumen Kebijakan UMKM sebanyak 1 (satu) dokumen.

3.2.5. Bagian Administrasi Pembangunan

Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Administrasi Pembangunan mengampu 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan.

3.2.5.1. Program Perekonomian Dan Pembangunan

1. Kegiatan Administrasi Pembangunan

A. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Dalam melaksanakan APBD secara tertib dan teratur, terdapat beberapa kendala, di antaranya: kesulitan dalam pengumpulan data program, kegiatan dan pekerjaan untuk penyusunan analisa standar harga satuan. Kegiatan ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa penyusunan dokumen Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Biaya Belanja Daerah (SBBDD) yang dijadikan acuan bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Cimahi. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah penyusunan dokumen Standar Harga Satuan (SHS), Analisa Standar Belanja dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

B. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Maksud dan tujuan kegiatan evaluasi dan pelaporan adalah untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada seluruh Sekretariat Daerah agar dapat berjalan secara berkesinambungan, terkendali dengan menggunakan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ini mencakup: pengendalian pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah, evaluasi kegiatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan melalui pemanfaatan aplikasi *e-reporting*. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terselenggaranya pelaporan Pencapaian Fisik dan Keuangan oleh 28 (dua puluh delapan) Perangkat Daerah, dan terselenggaranya Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan oleh 28 (dua puluh delapan) Perangkat Daerah.

3.2.6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengampu 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan.

3.2.6.1. Program Perekonomian Dan Pembangunan

1. Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa

A. Sub Kegiatan Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain (penyedia) dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa. Yang menjadi isu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah adanya angka kegagalan pengadaan barang dan jasa. Maksud dan tujuan diadakannya sub kegiatan ini adalah untuk meminimalisir kesalahan yang mengakibatkan kegagalan proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Cimahi dengan melaksanakan beberapa sub kegiatan dalam kegiatan pelayanan

pengadaan barang dan jasa. Selain itu tujuan utamanya tentu untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan Instansi Pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu dan tentunya untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di lingkup Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cimahi. Ruang lingkup sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi/ Sosialisasi PBJ, Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 1 (satu) kegiatan.

B. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa, selain proses pengadaan barang dan jasa yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya diperlukan akselerasi perubahan teknologi informasi dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan *e-government* dalam pelayanan publik. Untuk tujuan tersebutlah, sub kegiatan pengadaan layanan pengadaan secara elektronik ini diadakan. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 100%.

C. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa

Sub kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa di atas. Dalam pelaksanaannya, selain proses pengadaan barang dan jasa yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diperlukan juga perencanaan dan pembinaan di bidang pengadaan barang dan jasa, baik secara internal maupun eksternal. Metode

pelaksanaan terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. Tahap persiapan dilaksanakan melalui rapat-rapat pra pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan tahapan target pada saat persiapan dan tahap evaluasi dan monitoring dilaksanakan pasca pelaksanaan. Ruang lingkup sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terfasilitasinya Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 100%.

3.2.7. Bagian Organisasi

Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Organisasi mengampu 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan.

3.2.7.1. Program Administrasi Umum

1. Kegiatan Penataan Organisasi

A. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana

Reformasi birokrasi terus dikembangkan dan digalakan selama beberapa periode. Namun tidak dapat ditampik bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan hingga saat ini pun masih menyisakan berbagai permasalahan. Kondisi ini yang kemudian memunculkan persepsi bahwa aparatur negara yang memiliki profesionalitas dan komitmen terhadap publik masih rendah. Hal ini kemudian menyebabkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal, serta waktu yang ada tidak digunakan secara produktif. Selain itu akuntabilitas, responsibilitas dan empati aparatur pemerintah terhadap kepentingan masyarakat masih rendah. Kondisi demikian yang mempengaruhi masih rendahnya kemampuan melaksanakan standar kinerja birokrasi seperti yang diharapkan.

Tujuan sub kegiatan ini antara lain meningkatkan performa kinerja Sekretariat Daerah yang memiliki peta proses bisnis dan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan

berbasis *e-government*, meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dan meningkatkan profesionalisme aparatur yang memiliki budaya kerja, kreatif dan inovatif. Sementara itu ruang lingkup sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: penyusunan Dokumen SOP perangkat daerah sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan dokumen inventarisasi SOP perangkat daerah sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan dokumen inventarisasi standar pelayanan perangkat daerah sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan dokumen laporan revidi Standar Pelayanan sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan dokumen inventarisasi Peta Proses Bisnis perangkat daerah sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan dokumen Tata Naskah Dinas sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) perangkat daerah sebanyak 1 (satu) dokumen.

B. Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan adalah:

- Menyusun suatu kajian evaluasi kelembagaan terhadap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam rangka menemukan format perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Ruang lingkup sub kegiatan ini terdiri dari sosialisasi, inventarisasi permasalahan dan data, pembahasan analisis dan data serta penyusunan naskah akademis/draft Peraturan Daerah;
- Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Analisis jabatan merupakan pengkajian berbagai data tentang jabatan struktural dan fungsional sehingga dihasilkan informasi mengenai jenis jabatan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Tahapan penyusunannya terdiri dari

pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan penetapan hasil jabatan. Sementara itu, penyusunan analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh unit organisasi (standar norma waktu, jumlah kebutuhan pegawai dan pejabat, efisiensi dan efektifitas jabatan serta efisiensi dan efektifitas unit). Tahapan dalam penyusunannya terdiri dari: Bimbingan teknis analisis beban kerja, pengumpulan data jabatan, pembahasan draft hasil analisis dan sosialisasi hasil analisis.

- Memfasilitasi Sekretaris Daerah dalam mengikuti kegiatan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Foresdasi). Foresdasi didirikan pada tahun 2011 dan dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri. Tujuan dibentuknya Foresdasi ini adalah sebagai sarana melaksanakan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) antar para Sekretaris Daerah dalam rangka membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu ruang lingkup sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: penyusunan kajian kelembagaan sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan draft peraturan kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebanyak 1 (satu) dokumen, penyelenggaraan fasilitasi Foresdasi sebanyak 1 (satu) kegiatan, penyusunan draft Perwal Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan Kelas Jabatan sebanyak 1 (satu) dokumen.

C. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi

Ruang lingkup dari sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi meliputi 8 area perubahan, *quick wins* dan program-programnya yang terdiri dari manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan

peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan dasar dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka penataan jabatan dan reformasi bidang sumber daya aparatur, perlu ditentukan peringkat jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan pegawai negeri sipil berdasarkan nilai jabatan melalui evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang selanjutnya digunakan dalam pemeringkatan jabatan. Hasil evaluasi jabatan berupa nilai dan peringkat jabatan ini dapat digunakan antara lain dalam penghitungan tunjangan, penempatan, dan penataan jabatan. Tujuan fasilitasi evaluasi jabatan pegawai negeri sipil ini adalah sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengevaluasi jabatan jika terjadi perubahan dalam revisi analisis jabatan agar memiliki pola dan standar yang sama dalam penyusunan nilai dan kelas jabatan. Ruang lingkup sub kegiatan penyusunan evaluasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini meliputi seluruh jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Adapun kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diantaranya meliputi kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja kota sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Perubahan sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan dokumen Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan dokumen Rencana Aksi Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) dokumen), penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) kota sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) dokumen.

3.2.8. Bagian Umum dan Protokol

Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Umum dan Protokol mengampu 1 (satu) program, 6 (tujuh) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub kegiatan.

3.2.8.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

A. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Target kinerja sub kegiatan ini

pada Tahun Anggaran 2021 adalah tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor selama 12 (dua belas) bulan.

B. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam bentuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sehingga terpenuhi kebutuhan aparatur berupa sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk kelancaran kegiatan serta meningkatkan kinerja aparatur. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 8 (delapan) set dan terpeliharanya perlengkapan/perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan.

C. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah menyediakan peralatan rumah tangga sebagai pendukung terlaksananya kegiatan harian maupun kegiatan peringatan hari-hari besar. Hari Ulang Tahun Kota Cimahi, Peringatan HUT RI, dan peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kota Cimahi dengan baik dan terkoordinir, efektif dan efisien. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 1 (satu) set.

D. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah menyediakan logistik kantor, penyediaan makan dan minum harian kepala daerah, wakil kepala daerah dan eselon 2 di lingkup Sekretariat Daerah dan penyediaan Tenaga Harian Lepas (THL) penata boga dan penata jamuan selama 12 bulan.

E. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Maksud diadakannya sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi untuk mendukung kelancaran aktifitas administrasi perkantoran. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terfasilitasinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang terdiri dari kalender dan buku disposisi selama 12 (dua belas) bulan.

F. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan makanan dan minuman untuk mendukung terlaksananya kegiatan harian, peringatan Hari Ulang Tahun Kota Cimahi, Peringatan HUT RI, dan peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kota Cimahi dengan baik dan terkoordinir, efektif dan efisien serta bekerjasama dengan *leading sector* dalam menyelenggarakan acara/kegiatan. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah tersedianya makanan dan minuman rapat selama 12 (dua belas) bulan.

2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

A. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Tujuan sub kegiatan ini adalah untuk menyelenggarakan pengadaan mebeur, agar tersedia fasilitas untuk aparaturnya dan tercapainya kebutuhan mebeur untuk penunjang pelaksanaan kegiatan aparaturnya. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terselenggaranya pengadaan mebeur sebanyak 5 (lima) set.

B. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan rumah dinas kepala daerah, rumah dinas wakil kepala daerah, rumah dinas Sekretaris Daerah serta gudang penyimpanan barang.

C. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka fasilitasi kepala daerah, wakil kepala daerah dan Sekretaris Daerah selama 12 (dua belas) bulan.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

A. Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan dalam memfasilitasi kegiatan harian, peringatan Hari Ulang Tahun Kota Cimahi, Peringatan HUT RI, dan peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kota Cimahi dengan baik dan terkoordinir, efektif dan efisien serta bekerjasama dengan *leading sector* dalam menyelenggarakan acara/kegiatan. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terfasilitasinya kegiatan Pemerintah Kota Cimahi selama 12 (dua belas) bulan.

B. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Substansi sub kegiatan ini berupa penyediaan alat kebersihan kantor dan penyediaan sumber daya manusia sebagai tenaga *cleaning service* di lingkungan kantor Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan rumah dinas. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terjaganya kebersihan kantor selama 12 (dua belas) bulan.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

A. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional bermotor dengan baik sebagai penunjang kelancaran fasilitasi kegiatan serta meningkatkan kinerja aparatur dan menyelenggarakan pengadaan BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk kendaraan dinas/operasional. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terpeliharanya kondisi 11 (sebelas) unit kendaraan peruntukan wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah dan eselon 2 di lingkup sekretariat Daerah selama 12 (dua belas) bulan dan pengurusan atas pajak kendaraan tersebut.

B. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya syarat perizinan kendaraan bermotor dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional bermotor dengan baik sebagai penunjang kelancaran fasilitasi kegiatan serta meningkatkan kinerja aparatur serta asuransi atas kendaraan dinas/operasional. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terselenggaranya jasa pemeliharaan, asuransi kendaraan dan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk 56 (lima puluh enam) unit yang terdiri dari kendaraan roda 2 sebanyak 30 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 25 unit dan kendaraan roda 6 sebanyak 1 unit.

C. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk mengadakan pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemerintahan Daerah Kota

Cimahi agar tetap ada dalam kondisi baik dan terawat serta menghindari resiko rusak ringan, berat atau hancur. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terpeliharanya gedung perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi meliputi Gedung A, B dan C selama 12 (dua belas) bulan.

D. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk mengadakan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana gedung Pemerintahan Daerah Kota Cimahi agar tetap ada dalam kondisi baik dan terawat serta menghindari resiko rusak ringan, berat atau hancur. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor yang terdiri dari: Alat Pemadam Api Ringan (APAR), genset, pompa air, trafo listrik, lift, *Circuit Central Television (CCTV)*, *Air Conditioner (AC)* gedung perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi meliputi Gedung A, B dan C dan juga laundry alat kantor seperti karpet mushola, umbul-umbul dan bandir, bendera rumbai dan peralatan rumah tangga selama 12 (dua belas) bulan.

5. Pelaksanaan Administrasi Umum

A. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan logistik, alat/bahan kebersihan rumah dinas wali kota beserta tenaga pengemudi, pramubakti dan *cleaning service* selama 12 (dua belas) bulan.

B. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan logistik, alat/bahan kebersihan rumah dinas wakil wali kota

beserta tenaga pengemudi, pramubakti dan *cleaning service* selama 12 (dua belas) bulan.

C. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan logistik, alat/bahan kebersihan rumah dinas sekretaris daerah beserta tenaga pengemudi, pramubakti dan *cleaning service* selama 12 (dua belas) bulan.

D. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan set seragam kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta atribut dan kelengkapannya.

6. Kegiatan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

A. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah:

- Menghimpun masukan sebagai dasar penyusunan program kerja Kepala Daerah, serta sebagai sarana pengawasan langsung oleh tokoh masyarakat, organisasi sosial dan kemasyarakatan kepada Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kepala Daerah; Fasilitasi kegiatan harian, kegiatan PHBN, kegiatan peringatan HUT Kota Cimahi dan HUT RI di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi
- Sarana bagi Kepala Daerah untuk melakukan koordinasi secara langsung dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam melaksanakan perencanaan pembangunan baik berupa fisik maupun non fisik serta sebagai sarana komunikasi;
- Menciptakan suatu hubungan kerjasama dan silaturahmi yang baik antar warga Kota Cimahi dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi serta meninjau secara langsung

pertumbuhan atau perkembangan pembangunan yang terjadi di wilayahnya;

- Mendorong terjalinnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kota Cimahi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
- Menciptakan suatu jalinan koordinasi yang baik antara pimpinan daerah dengan para pejabat daerah dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai sarana bagi Kepala Daerah untuk memberikan masukan-masukan dan melakukan koordinasi, evaluasi dan penilaian secara langsung kepada jajaran pejabat pemerintah daerah dalam menyelesaikan program-program kerja serta sebagai sarana komunikasi dan terjalinnya hubungan kerja yang baik dan harmonis.

Sementara itu target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terfasilitasinya 78 (tujuh puluh delapan) dialog, terfasilitasinya inspeksi sebanyak 48 (empat puluh delapan) kegiatan, terfasilitasinya 100 (seratus) kegiatan, terfasilitasinya 25 (dua puluh lima) kunjungan dan terfasilitasinya 24 (dua puluh empat) rapat koordinasi.

3.2.9. Bagian Tata Usaha

Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengampu 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan, dan 8 (delapan) sub kegiatan.

3.2.9.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi dalam berbagai dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Target kinerjanya pada Tahun Anggaran 2021 adalah tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Parsial Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen, DPA perubahan parsial Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 sebanyak 1 (satu) dokumen.
- Penyusunan rivi u atas perencanaan program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 tahunan (Renstra) dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Target kinerjanya pada Tahun Anggaran 2021 adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen dan penyusunan Revi u Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Cimahi sebanyak 1 (satu) dokumen.
- Penyediaan data dan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Sementara itu target kinerjanya pada Tahun Anggaran 2021 adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Cimahi akhir Tahun Anggaran 2020 sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebanyak 1

(satu) dokumen, penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen, Penyusunan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan Rencana Aksi Sekretariat Daerah sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan perubahan Rencana Aksi Sekretariat Daerah sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) Sekretariat Daerah Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan Sekretariat Daerah Kota Cimahi sebanyak 4 (empat) dokumen, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulanan Sekretariat Daerah Kota Cimahi sebanyak 4 (empat) dokumen, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja individu (IKI) triwulanan Sekretariat Daerah Kota Cimahi sebanyak 4 (empat) dokumen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah penyediaan gaji dan tunjangan kinerja bagi seluruh ASN di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi serta gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terfasilitasinya gaji dan tunjangan bagi seluruh ASN di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi serta terfasilitasinya gaji dan tunjangan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi.

B. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran

Maksud dari sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi, juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD di lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran atas realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh seluruh bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

C. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Maksud dari sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi, juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan selama Tahun Anggaran 2021. Sementara itu, tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan akhir tahun atas realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh seluruh bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

A. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah penyediaan bahan bacaan untuk pimpinan (wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, para staf ahli, para asisten daerah dan para kepala bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi).

B. Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tujuan dan sasaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Terasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka meningkatkan hubungan kerja antar instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah serta non lembaga pemerintah;

- Terciptanya hubungan kerja yang harmonis antar instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah serta lembaga non pemerintah
- Menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Menghasilkan *output*/hasil kerja yang optimal.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

A. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik serta pembayaran multimedia (TV Kabel) pimpinan. Sementara itu, ruang lingkup sub kegiatan ini meliputi pembayaran atas rekening tagihan nomor telepon kantor, nomor telepon rumah dinas, nomor telepon seluler wali kota, wakil wali kota dan sekretaris daerah, nomor rekening air rumah dinas, nomor rekening listrik kantor dan rumah dinas, tagihan multimedia kantor dan rumah dinas.

B. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah memfasilitasi pimpinan dalam administrasi persuratan dengan ruang lingkup kegiatan berupa pengelolaan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar dan pengelolaan arsip dinamis aktif, khususnya surat dan arsip untuk lingkup Sekretariat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
CIMAHU TAHUN ANGGARAN 2021

Bab empat ini akan menyajikan rencana program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

Tabel 4.1. Rencana Program Dan Kegiatan Bagian Pemerintahan Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
		(1).Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Yang Bernilai Baik; (2).Persentase Kerjasama Daerah Yang Terfasilitasi; (3).Persentase Produk Hukum Yang Tersusun; (4).Persentase Kasus Hukum Terfasilitasi; (5).Persentase Kegiatan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Sosial Dan Kepemudaan Olahraga Yang Difasilitasi; (6).Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi; (7).Persentase Pemilu Yang Difasilitasi;		(1).100 Persen; (2).100 Persen; (3).100 Persen; (4).100 Persen; (5).71 Persen; (6).97 Persen; (7). Persen;	621.723.200				
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan								
		(1).Jumlah Dokumen; (2).Jumlah Dokumen ; (3).Jumlah Koordinasi Yang Difasilitasi; (4).Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi;		(1).11 Dokumen; (2).3 Dokumen; (3).12 Kegiatan; (4).3 Lembaga;	504.075.700				
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	(1).Jumlah Dokumen Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan KDH dan WakDh; Kota Cimahi; (2).Jumlah Dokumen Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Cimahi; (3).Jumlah Dokumen Keputusan Pengantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Cimahi; (4).Jumlah Dokumen SPM; (5).Jumlah Koordinasi Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) Tingkat Provinsi;		(1).4 Dokumen; (2).2 Dokumen; (3).2 Dokumen; (4).1 Dokumen; (5).4 Dokumen;	177.441.000	APBD KOTA			
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	(1).Jumlah Dokumen LKPJ; (2).Jumlah Dokumen LPPD; (3).Jumlah Dokumen RUPD;		(1).1 Dokumen; (2).1 Dokumen; (3).1 Dokumen;	170.000.000	APBD KOTA			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	(1).Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi; (2).Jumlah Koordinasi Kewilayahan yang difasilitasi;		(1).4 Kegiatan; (2).12 Kegiatan;	156.634.700	APBD KOTA			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah									
		(1)Jumlah Dokumen;		(1).455 Dokumen;	117.647.500					
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	(1).Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama;		(1). 3 Dokumen;	37.250.000	APBD KOTA				
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	(1).Jumlah Dokumen NPHD yang Dibahas di Forum TKKSD; (2).Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja Sama yang Dibahas di Forum TKKSD; (3).Jumlah Dokumen Nota Kesepahaman yang Dibahas di Forum TKKSD;		(1).330 Dokumen; (2).76 Dokumen; (3).46 Dokumen;	80.397.500	APBD KOTA				
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN									
	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/Kota									
		(1).Jumlah Dokumen;		(1).4 Dokumen;	108.725.000					
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	(1).Jumlah Dokumen Balas Antar Daerah; (2).Jumlah Dokumen Balas Antar Kecamatan/ Kelurahan; (3).Jumlah Dokumen Balas Antar RW/RT; (4).Jumlah Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi;		(1). 1 Dokumen; (2).1 Dokumen; (3). 1 Dokumen; (4). 1 Dokumen;	108.725.000	APBD KOTA				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	PERTANAHAN									
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN									
		(1).Persentase Penegasan Batas Daerah Yang Telah Diidentifikasi;		(1).100 Persen;	27.378.800					
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota.									
		(1).Jumlah Sengketa Tanah Yang Difasilitasi;		(1).4 Kegiatan;						
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	(1).Jumlah Mediasi yang Difasilitasi;		(1).4 Kegiatan;	27.378.800	APBD KOTA				
	Total				757.827.000					

Tabel 4.2. Rencana Program Dan Kegiatan Bagian Hukum Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
		(1).Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Yang Bernilai Baik; (2).Persentase Kerjasama Daerah Yang Terasiliasi; (3).Persentase Produk Hukum Yang Tersusun; (4).Persentase Kasus Hukum Terasiliasi; (5).Persentase Kegiatan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Sosial Dan Kepemudaan Olahraga Yang Derasiliasi; (6).Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Derasiliasi; (7).Persentase Pemilu Yang Derasiliasi;		(1).100 Persen; (2).100 Persen; (3).100 Persen; (4).100 Persen; (5).71 Persen; (6).97 Persen; (7).- Persen;	362.574.600				
	fasilitasi dan Koordinasi Hukum	(1).Jumlah Sosialisasi Hukum; (2).Jumlah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pemberian Bantuan Hukum; (3).Jumlah Cetak Bahan Publikasi Perundang-Undangan; (4).Jumlah Cetak Buku Perda; (5).Jumlah Cetak Ulang Buku Perda; (6).Jumlah Dokumen Laporan Ranting; (7).Jumlah Dokumen Penilaian Kota Peduli Ham; (8).Jumlah Fasilitas Kegiatan Sosialisasi Hukum Untuk Asri; (9).Jumlah Fasilitas Kegiatan Sosialisasi Hukum Untuk Masyarakat Dan Sekolah; (10).Jumlah Himpunan Produk Hukum Daerah; (11).Jumlah Legal Memorandum; (12).Jumlah Pembahasan Pemmasalahan Hukum; (13).Jumlah Perkara Perdata Dan Atau Tata Usaha Negara Yang Ditangani Lembaga Peradilan; (14).Jumlah Produk Hukum Daerah Berupa Keputusan Kepala Daerah Dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah; (15).Jumlah Produk Hukum Daerah Berupa Peraturan Kepala Daerah; (16).Jumlah Produk Hukum Daerah Berupa Rancangan Peraturan Daerah; (17).Jumlah Rapat Koordinasi Sosialisasi Ranting; (18).Jumlah Saksi Yang Didampingi Terkait Pemmasalahan Hukum Litigasi Maupun Non-Litigasi; (19).Jumlah Website Yang Dipelihara; (20).Pelaksanaan Workshop Penyusunan Produk Hukum; (21).Jumlah Kajian Produk Hukum Daerah;		(1).1 Kegiatan; (2).4 Kasus; (3).- Paket; (4).1 Paket; (5).- Paket; (6).4 Dokumen; (7).1 Dokumen; (8).- Sosialisasi; (9).17 penyuluhan hukum Sosialisasi; (10).-3 Buku; (11).3 memorandum; (12).15 Kasus; (13).1 Kasus; (14).750 Surat Keputusan; (15).30 Perwal; (16).8 Raperda; (17).1 Kegiatan; (18).5 Kasus; (19).- Website; (20).- Kegiatan; (21).1 Dokumen;	362.574.600				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	(1).Jumlah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pemberian Bantuan Hukum; (2).Jumlah Dokumen Laporan Ranham; (3).Jumlah Dokumen Penilaian Kota Peduli HAM; (4).Jumlah Legal Memorandum; (5).Jumlah Pembahasan Pemmasalahan Hukum; (6).Jumlah Perkara Perdada dan atau Tala Usaha Negara yang Ditangani Lembaga Peradilan; (7).Jumlah Rapat Koordinasi Sosialisasi RANHAM ; (8).Jumlah Saksi yang Didampingi Terkait Pemmasalahan Hukum Litigasi maupun non- Litigasi;		(1).4 Kasus; (2).4 Dokumen; (3).1 Dokumen; (4).3 memorandum; (5).15 Kasus; (6).1 Kasus; 7).1 Kegiatan; (8).5 Kasus;	193.377.900	APBD KOTA			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	(1).Jumlah Kajian; (2).Jumlah Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah; (3).Jumlah Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Kepala Daerah; (4).Jumlah Produk Hukum Daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah; (5).Pelaksanaan Workshop Penyusunan Produk Hukum;		(1).1 Dokumen; (2).750 Surat Keputusan; (3).30 Perwal; (4).8 Raperda; (5).- Kegiatan;	56.259.500	APBD KOTA			
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	(1).Jumlah Cetak Bahan Publikasi Perundang-undangan, (2).Jumlah Cetak Buku Perda; (3).Jumlah Cetak Ulang Buku Perda; (4).Jumlah Fasilitas Kegiatan Sosialisasi Hukum untuk ASN; (5).Jumlah Fasilitas Kegiatan Sosialisasi Hukum untuk Masyarakat dan Sekolah; (6).Jumlah Himpunan Produk Hukum Daerah; (7).Jumlah Sosialisasi Hukum, (8).Jumlah Website yang Dipelihara;		(1).1 Paket; (2).1 Paket (3).- Paket (4).- Kegiatan; (5).1 Kegiatan; (6).Buku; (7).- Kegiatan; (8).- Website;	112.937.200	APBD KOTA			
	Total				362.574.600				

Tabel 4.3. Rencana Program Dan Kegiatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
		(1).Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Yang Bernilai Baik; (2).Persentase Kerjasama Daerah Yang Terfasilitasi; (3).Persentase Produk Hukum Yang Tersusun; (4).Persentase Kasus Hukum Terfasilitasi;(5).Persentase Kegiatan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Sosial Dan Kepemudaan Olahraga Yang Difasilitasi; (6).Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi; (7).Persentase Pemilu Yang Difasilitasi;		(1)100 Persen; (2)100 Persen; (3)100 Persen; (4)100 Persen; (5)71 Persen;	2.213.614.100				
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		(6)97 Persen; (7). Persen;	2.213.614.100				
		(1).Fasilitas Kegiatan Bidang Keagamaan yang Dilaksanakan; (2).Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang Dilaksanakan; (3).Jumlah Kegiatan yang Tersinergikan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan; (4).Jumlah Kegiatan yang Tersinergikan di Bidang Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Dilaksanakan; (5).Jumlah Kegiatan yang Tersinergikan di Bidang Sosial Kemasyarakatan yang Dilaksanakan; (6).Kegiatan yang Tersinergikan di Bidang Kesehatan yang dilaksanakan; (7).Layanan Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi;		(1)25 Kegiatan; (2)7 Kegiatan; (3)8 Kegiatan; (4)7 Kegiatan; (5)6 Kegiatan; (6)6 Kegiatan; (7)16 Kegiatan;					
	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	(1).Jumlah Kegiatan Pospeda Pontren Tk. Provinsi Jawa Barat yang Difasilitasi; (2).Fasilitasi Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan; (3).Fasilitasi Pengiriman Peserta Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan; (4).Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang Dilaksanakan;		(1). Kegiatan; (2).5Kegiatan; (3).2 Kegiatan; (4).1 Kegiatan;	145.874.000	APBD KOTA			

Kode	Usaha/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	(1) Rapat Koordinasi Bidang P2KBP3A yang dilaksanakan; (2) Rapat Bidang P2KBP3A yang dilaksanakan; (3) Rapat Kerja Komda Lansia yang dilaksanakan; (4) Rapat Bidang Kesehatan yang dilaksanakan; (5) Rapat Koordinasi Komda Lansia yang dilaksanakan; (6) Rapat Koordinasi Bidang Sosial yang dilaksanakan; (7) Fasilitas Kegiatan Bidang Sosial yang dilaksanakan; (8) Fasilitas Pengiriman Peserta Bidang Sosial yang dilaksanakan; (9) Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan yang dilaksanakan; (10) Monitoring Sekolah Binaan yang dilaksanakan;		(11) Kegiatan; (12) Kegiatan; (13) Kegiatan; (14) Kegiatan; (15) Kegiatan; (16) Kegiatan; (17) Kegiatan; (18) Kegiatan; (19) Kegiatan; (20) Kegiatan; (21) Kegiatan; (22) Kegiatan; (23) Kegiatan; (24) Kegiatan;	173.518.700	APBD KOTA			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Bina Mental Spiritual	(1) Kegiatan Istighosah yang difasilitasi; (2) Kegiatan Idul Fitri yang dilaksanakan; (3) Kegiatan Forum Ulama Umato yang difasilitasi; (4) Kegiatan Forum Tarawih Keiling yang difasilitasi; (5) Kegiatan Jumat Keiling yang difasilitasi; (6) Kegiatan Doa Bersama Anak Yatim dan Dhuafa yang difasilitasi; (7) Kegiatan Pembinaan Wawasan Bidang Keagamaan yang dilaksanakan; (8) Kegiatan Pembinaan Marbot Masjid/Musholla yang dilaksanakan; (9) Kegiatan Pengingatan Maulid Nabi yang dilaksanakan; (10) Kegiatan Pengingatan Isra Miraj yang dilaksanakan; (11) Kegiatan Pengingatan Nuzul Quran yang dilaksanakan; (12) Kegiatan Pengingatan Tahun Baru Islam yang dilaksanakan; (13) Kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri yang dilaksanakan; (14) Kegiatan STQ Tk. Provinsi Jawa Barat yang difasilitasi; (15) Kegiatan MTQ Tk. Kota Cimahi yang dilaksanakan; (16) Kegiatan Pengiriman Peserta Keagamaan yang difasilitasi; (17) Kegiatan Fasilitas Kegiatan Bidang Agama dan Pendidikan ; (18) Kegiatan Fasilitas Biaya Operasional dan Transportasi Jamaah haji yang dilaksanakan; (19) Kegiatan Fasilitas Haridz Quran yang dilaksanakan; (20) Kegiatan Fasilitas Pengingatan Hari Santri Nasional yang dilaksanakan; (21) Kegiatan Perjalanan ibadah Haji (TPHD) yang difasilitasi; (22) Kegiatan Magrib Mengaji dan Fasilitas Masjid yang dilaksanakan; (23) Kegiatan Idul Adha yang dilaksanakan;		(1) Kegiatan; (2) Kegiatan; (3) Kegiatan; (4) Kegiatan; (5) Kegiatan; (6) Kegiatan; (7) Kegiatan; (8) Kegiatan; (9) Kegiatan; (10) Kegiatan; (11) Kegiatan; (12) Kegiatan; (13) Kegiatan; (14) Kegiatan; (15) Kegiatan; (16) Kegiatan; (17) Kegiatan; (18) Kegiatan; (19) Kegiatan; (20) Kegiatan; (21) Kegiatan; (22) Kegiatan; (23) Kegiatan; (24) Kegiatan;	1.894.221.400	APBD KOTA			
	Total				2.213.614.100				

Tabel 4.4. Rencana Program Dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
		(1).Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Yang Bernilai Baik; (2).Persentase Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian; (3).Persentase Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Terfasilitasi; (4).Persentase Pelaksanaan Pekerjaan Yang Di Monev;		(1).100 Persen; (2).100 Persen; (3).100 Persen; (4).100 Persen;	475.265.100				
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								
		(1).Jumlah Dokumen; (2).Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan; (3).Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaporkan Pencapaian Pembangunan Fisik Dan Keuangan; (4).Jumlah Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Standar Harga Satuan (SHS);		(1).2 Dokumen; (2).28 Perangkat Daerah; (3).28 Perangkat Daerah; (4).28 Perangkat Daerah;	475.265.100				
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	(1).Jumlah Dokumen; (2).Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Standar Harga Satuan (SHS);		(1).2 Perangkat Daerah;(2).28 Perangkat Daerah;	245.005.400	APBD KOTA			
	Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	(1).Jumlah Perangkat Daerah yang Melaporkan Pencapaian Fisik dan Keuangan;(2).Jumlah Perangkat Daerah yang Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan;		(1).28 Perangkat Daerah;(2).28 Perangkat Daerah;	226.259.700	APBD KOTA			
	Total				475.265.100				

Tabel 4.5. Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
		(1) Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Yang Benilai Baik; (2) Persentase Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian; (3) Persentase Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Terfasilitasi; (4) Persentase Pelaksanaan Pekerjaan Yang Di Money;		(1), 100 Persen; (2), 100 Persen; (3), 100 Persen; (4), 100 Persen;	273.862.000					
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									
		(1) Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang Tersusun; (2) Jumlah Lembaga Keuangan Yang Melaksanakan MOU; (3) Jumlah Laporan Hasil fasilitasi Kebijakan Pangan yang Tersusun; (4) Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Program CSR / TJSI;		(1), 1 Dokumen; (2), 1 Dokumen; (3), 1 Laporan; (4), 10 perusahaan;						
	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD	(1) Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD yang Disusun; (2) Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD yang Disusun;		(1), 1 Dokumen; (2), 1 Dokumen;		128.885.800	APBD KOTA			
	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	(1) Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang Disusun; (2) Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kegiatan Dewan Kelatanaan Pangan yang Tersusun; (3) Jumlah Dokumen Kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang Tersusun; (4) Jumlah Lembaga Keuangan yang melaksanakan Kejasama; (5) Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Program CSR / TJSI;		(1), 1 Dokumen; (2), 1 Laporan; (3), 1 Dokumen; (4), 1 Lembaga; (5), 10 perusahaan;		104.195.200	APBD KOTA			
	Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	(1) Jumlah Dokumen Kebijakan UNKMN yang Tersusun;		(1), 1 Dokumen;	40.777.00	APBD KOTA				
	Total									
					273.862.000					

Tabel 4.6. Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							
		(1).Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Yang Bermilai Baik; (2).Persentase Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Kebijakan Perakonomian; (3).Persentase Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Terasiliasi; (4).Persentase Pelaksanaan Pekerjaan Yang Di Monev;		(1).100 Persen; (2).100 Persen; (3).100 Persen; (4).100 Persen;				
	Pengadaan Barang Dan Jasa				204.156.500			
		(1).Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi/ Sosialisasi Pbi, Bimtek Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa; (2).Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Terasiliasi Oleh Sistem Teknologi Informasi; (3).Persentase Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Terasiliasi;		(1).1 Kegiatan; (2).100 Persen; (3).100 Persen;				
	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	(1).Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi/ Sosialisasi PBU, Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa;		(1).1 Kegiatan;	66.731.600	APBD KOTA		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	(1).Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terasiliasi oleh Sistem Teknologi Informasi;		(1).100 Persen;	63.965.800	APBD KOTA		
	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	(1).Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Terasiliasi;		(1).100 Persen;	73.459.100	APBD KOTA		
	Total				204.156.500			

Tabel 4.7. Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM								
		(1) Nilai Komponen Pelaporan LKIP Kota; (2) Persentase PD Yang Memiliki Evaluasi Jabatan Yang Baik; (3) Persentase PD/Unit Pelayanan Publik Yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ; (4) Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi; (5) Persentase Kegiatan KDH Dan WAKDH Yang Terasiliasi;		(1) 100 Persen; (2) 100 Persen; (3) 45 Persen; (4) 100 Persen; (5) 100 Persen;	4362.196.900				
	Penataan Organisasi	(1) JUMLAH DOKUMEN; (2) JUMLAH KEGIATAN ;		(1) 18 Dokumen; (2) 1 Kegiatan;	362.196.900				
	Facilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	(1) Jumlah Dokumen SOP Perangkat Daerah; (2) Jumlah Dokumen Inventarisasi SOP Perangkat Daerah; (3) Jumlah Dokumen Inventarisasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah; (4) Jumlah dokumen laporan review Standar Pelayanan; (5) Jumlah dokumen inventarisasi peta proses bisnis Perangkat Daerah; (6) Jumlah dokumen tata naskah dinas ; (7) Jumlah dokumen SKM Perangkat Daerah;		(1) 1 Dokumen; (2) 1 Dokumen; (3) 1 Dokumen; (4) 1 Dokumen; (5) 1 Dokumen; (6) 1 Dokumen; (7) 1 Dokumen;	94.999.900	APBD KOTA			
	Pengelolaan Kelenbagaan Dan Analisis Jabatan	(1) Jumlah Kajian Kelenbagaan; (2) Jumlah Draft Peraturan Kelenbagaan Pemerintah Daerah Kota Cimahi; (3) Jumlah Fasilitas Forssedasi ; (4) Jumlah Draft Perwal Anjab, ABK, Peta Jabatan dan Kelas Jabatan;		(1) 1 Dokumen; (2) 1 Dokumen; (3) 1 Kegiatan; (4) 1 Dokumen;	167.197.000	APBD KOTA			
	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	(1) Jumlah Dokumen Pelembagaan Kinerja Perangkat Daerah Perubahan; (2) Jumlah Dokumen Money Reformasi Birokrasi; (3) Jumlah Dokumen Pelembagaan Kinerja Kota; (4) Jumlah Dokumen Pelembagaan Kinerja Kota Perubahan; (5) Jumlah Dokumen Pelembagaan Kinerja Perangkat Daerah; (6) Jumlah Dokumen Rencana Aksi Perangkat Daerah; (7) Jumlah Dokumen LKIP Kota; (8) Jumlah Dokumen Money Rencana Aksi Perangkat Daerah;		(1) 1 Dokumen; (2) 1 Dokumen; (3) 1 Dokumen; (4) 1 Dokumen; (5) 1 Dokumen; (6) 1 Dokumen; (7) 1 Dokumen; (8) 1 Dokumen;	100.000.000	APBD KOTA			
	Total				362.196.900				

Tabel 4.8. Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Protokol Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Kegiatan/Sub Kegiatan)	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								(10)
	PENDUKUNG PEMERINTAHAN							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				18.643.154.716			
		(1).Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara; (2).Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi; (3).Nilai LAKIP; (4).Persentase Realisasi Anggaran; (5).Persentase ASN Yang Dibina;		(1).100 Persen; (2).100 Persen; (3).85 Indeks; (4).85 Persen; (5).100 Persen;				
	Administrasi Umum				18.643.154.716			
		(1).Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum;		(1).0 Bulan;				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(1).Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor;		(1).12 Bulan;	3.746.791.816	APBD KOTA		
	Pengadaan Mebel	(1).Jumlah set pengadaan mebeleur;		(1).5 Set;	70.000.000	APBD KOTA		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(1).Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor;		(1).0 Bulan;	1.026.152.800	APBD KOTA		
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	(1).Jumlah bulan cetakan dan penggandaan;		(1).12 Bulan;	274.754.800	APBD KOTA		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(1).Jumlah bulan kebersihan kantor;		(1).12 Bulan;	988.522.100	APBD KOTA		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paik dan Peijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(1).Jumlah Unit Kendaraan yang diservice; (2).Jumlah bulan pemberian BBM; (3).Jumlah Unit Kendaraan yang Diasuransikan		(1).56 Unit; (2).12 Bulan; (3).56 Unit;	1.256.970.000	APBD KOTA		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(1).Jumlah Unit Kendaraan yang diservice; (2).Jumlah bulan pemberian BBM;		(1).11 Unit; (2).12 Bulan;	464.613.800	APBD KOTA		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(1).Jumlah Bulan Penyediaan Jasa;		(1).12 Bulan;	2.735.594.000	APBD KOTA		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(1).Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan;		(1).12 Bulan;	155.350.500	APBD KOTA		
	Fasilitas Kunjungan Tamu	(1).Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat;		(1).12 Bulan;	5.027.456.000	APBD KOTA		

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Kegiatan/Sub Kegiatan)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	(1) Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor;		(1) 8 Set;	794.756.400	APBD KOTA			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(2) Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan peralatan kantor;		(2) 12 Bulan;					
		(1) Jumlah set peralatan rumah tangga;		(1) 1 Set;	143.230.600	APBD KOTA			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(1) Jumlah penyediaan rumah dinas dan gudang		(1) 5 Unit;	1.296.817.000	APBD KOTA			
	Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(1) Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang disediakan;		(1) 4 Set;	85.552.000	APBD KOTA			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(1) Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah dan Gedung dinas yang dipelihara;		(1) paket;	576.592.900	APBD KOTA			
		(2) Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan;		(2) 12 Bulan;					
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM								
		(1) Nilai Komponen Pelaporan LKIP Kota;		(1) 100 Persen;	5.029.907.025				
		(2) Persentase PD Yang Memiliki Evaluasi Jabatan Yang Baik;		(2) 100 Persen;					
		(3) Persentase PDU Unit Pelayanan Publik Yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ;		(3) 45 Persen;					
		(4) Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi;		(4) 100 Persen;					
		(5) Persentase Kegiatan KDH Dan WakDH Yang Terasiliasi;		(5) 100 Persen;					
	Pelaksanaan Administrasi Umum				2.228.385.000				
		(1) Jumlah Bulan Penyediaan Logistik;		(1) 12 Bulan;					
		(2) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pengemudi dan Pramubakti KDH/Wa KDH;		(2) 12 Bulan;					
		(3) Jumlah Set Seragam;		(3) 21 Set;					
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	(1) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pengemudi dan Pramubakti Wali Kota;		(1) 12 Bulan;	878.691.200	APBD KOTA			
		(2) Jumlah Penyediaan Logistik Rumah Dinas Wali Kota;		(2) 12 Bulan;					
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	(1) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pengemudi dan Pramubakti Wakil Wali Kota;		(1) 12 Bulan;	603.340.200				
		(2) Jumlah Penyediaan Logistik Rumah Dinas Wakil Wali Kota;		(2) 12 Bulan;					
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekelatan Daerah	(1) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pengemudi dan Pramubakti Sekretariat Daerah;		(1) 12 Bulan;	455.904.600				
		(2) Jumlah Penyediaan Logistik Rumah Dinas Sekretariat Daerah;		(2) 12 Bulan;					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	(1) Jumlah Set Seragam		(1) 21 Set;	290.449.000				
	Protokol Dan Komunikasi Pimpinan				2.801.522.025				
		(1).Jumlah Dialog; (2).Jumlah Inspeksi ; (3).Jumlah kegiatan yang Difasilitasi; (4).Jumlah Kunjungan yang difasilitasi; (5).Jumlah Rapat Koordinasi yang difasilitasi;		(1).78 dialog; (2).48 inspeksi; (3).165 Kegiatan; (4).25 Kunjungan; (5).24 Rapat;					
	Fasilitasi Keptokobolan	(1).Jumlah Dialog yang Difasilitasi; (2).Jumlah Inspeksi yang Difasilitasi; (3).Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi; (4).Jumlah Kunjungan yang Difasilitasi; (5).Jumlah Rapat Koordinasi yang Difasilitasi;		(1).78 dialog; (2).48 kegiatan; (3).100 Kegiatan; (4).25 Kegiatan; (5).24 Kegiatan;	2.801.522.025	APBD KOTA			
	Total				23.673.061.741				

Tabel 4.9. Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Tahun 2021

Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Kegiatan/Sub Kegiatan)	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PENDUKUNG PEMERINTAHAN				33,133,317,820				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
		(1).Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara; (2).Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi; (3).Nilai LKIP Selda; (4).Persentase Realisasi Anggaran; (5).Persentase ASN Yang Dibina;		(1).100 Persen; (2).100 Persen; (3).BB; (4).85 Persen; (5).100 Persen;					
	Administrasi Keuangan			(1).- Dokumen; (1).145 Pegawai;	30.834.393.100				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(1).Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun; (1).Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan;		(1).145 Pegawai;	28.230.659.000	APBD KOTA			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	(1).Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		(1) 13 Dokumen	123.343.500	APBD KOTA			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(1).Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun;		(1) 1 Dokumen	8.039.400	APBD KOTA			
	Administrasi Umum				2,187,925,370				
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Penundang-Undangan	(1).Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum; (1).Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan aturan;		(1).12 Bulan; (1) 12 Bulan;	48.969.800	APBD KOTA			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	(1).Jumlah Bulan Jasa Air;(2).Jumlah Bulan Jasa Komunikasi;(3).Jumlah Bulan Jasa Listrik;		(1) 12 Bulan	1.430.950.000	APBD KOTA			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(1).Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar; (2).Jumlah Surat Perintah yang Difasilitasi		(1).30.000 surat; (2).100 SP;	753.958.700	APBD KOTA			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	(1).Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar;		(1) 30.000 surat;					
	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(1).Jumlah Surat Perintah yang Difasilitasi;		(1) 100 SP;	200.858.000	APBD KOTA			
		(1).Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun;		(1).28 Dokumen;	37.584.700				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(1).Jumlah dokumen		(1) 28 Dokumen	37.584.700	APBD KOTA			
	Total				30.834.393.100				

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 dan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Cimahi 2017-2022. Selain itu, penyusunan dokumen perencanaan ini juga mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

Dari berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat beberapa penyesuaian dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021. Penyesuaian tersebut sebagian besar berupa penurunan target kinerja dan pagu anggaran, sementara itu substansi program dan kegiatannya sebagian sama dengan substansi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020. Penurunan target kinerja dan pagu anggaran tersebut terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran belanja di tingkat kota, yang disebabkan penurunan pendapatan Kota Cimahi akibat pandemi Covid-19 dan pengalihan anggaran untuk *refocusing* penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19 khususnya di Kota Cimahi. Selain penyesuaian tersebut, dalam dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 ini juga terdapat perubahan nomenklatur dan susunan program, kegiatan dan sub kegiatan, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dokumen perencanaan ini menjadi dasar penyusunan anggaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021. Adapun dalam menghadapi kemungkinan perubahan anggaran yang terjadi, tetap

mempertahankan prioritas program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dan prioritas Kota Cimahi Tahun 2021.

Cimahi, Agustus 2020

Sekretaris Daerah Kota Cimahi

Dikdik S. Nugrahawan, S.Si, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720520 199901 1 001